

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		
Drs. Sunardi	Perumda Belangwetan RT 03 RW 16 Belangwetan Klaten Utara	210	02-04-2023	02-04-2028	S-271/KO.0301/2023	26-04-2023	Ya	25-10-2026
Fitri Rayahu, SE	Jambon RT 16 RW 07 Keden Pedan Klaten	220	02-04-2023	02-04-2028	S-271/KO.0301/2023	26-04-2023	Ya	25-10-2026
Febry Nurcahyo Alfath, SE	Puro Asri RT 22 RW 10 Puro Karangmalang Sragen	120	09-08-2024	09-08-2026	S-1117/KO.0301/2021	01-11-2021	Ya	17-03-2026

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
03	02-03-1977	UNDIP	SERTIFIKASI PROFESI	29-03-2021	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN MIKRO CERTIF	00	00	00			2
03	13-02-1990	UNS	SERTIFIKASI PROFESI	29-03-2021	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN MIKRO CERTIF	00	00	00			2
03	25-02-2008	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta	SERTIFIKASI PROFESI	12-01-2021	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN MIKRO CERTIF				00	2	

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal
Erna Wulandari	Jonggrangan RT 02 RW 01 Mrisen Juwiring Klaten	00	00	02	00	00	27-01-2016	015/SEKRT-WAU//2016	27-01-2016
Printi Astono	Dukuh Putatan RT 002 RW 001 Kurung Ceper Klaten	02	02	00	02	00	28-09-2020	274/BPR-WAU//IX/2020	28-09-2020
Erma Susilawati	Gumul RT 002 RW 002 Sembung Wedi Klaten	00	00	00	00	02	12-05-2017	168/Sekrt - WAU//I/2017	12-05-2017
Danang Bujono	Mudal Tengah RT 002 RW 004 Karangnom Klaten Utara Klaten	00	00	00	00	02	10-01-2022	05C/BPR-WAU//I/2022	10-01-2022

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Keanggotaan Komite

Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	
Drs. Sunardi	Perumda Belangwetan RT 03 RW 16 Belangwetan Klaten Utara	01	01	4.325.000.000	46,51	DRS. SUNARDI
Fitri Rahayu, SE	Jambon RT 16 RW 07 Keden Pedan Klaten	01	01	3.925.000.000	42,20	FITRI RAHAYU, SE
Drs. Hardjono	Jl. Sadewa I / 26 RT 005 RW 004 Pendrikan Kidul Semarang Tengah	01	02	1.050.000.000	11,29	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	C-07659HT.01.01.Th.2006
Tanggal akta pendirian	09-02-2006
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	03
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	09-08-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	8/73/KEP.GBI/2006
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	06-10-2006
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	06-10-2006
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Klaten

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	3.585.447.785
Beban Operasional	3.269.988.596
Pendapatan Non Operasional	11.733.272
Beban Non Operasional	5.660.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	321.532.461
Taksiran Pajak Penghasilan	35.368.572
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	286.163.889

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	7.005.925.566		0		0	7.005.925.566
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	55.831.950	0	0	0	0	55.831.950
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	10.024.612.494	6.711.746.715	1.080.959.027	1.192.016.841	2.989.023.967	21.998.359.044
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	17.086.370.010	6.711.746.715	1.080.959.027	1.192.016.841	2.989.023.967	29.060.116.560

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	90,19
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
Non Performing Loan (NPL) Neto	23,86
Non Performing Loan (NPL) Gross	23,61

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Return on Assets (ROA)	1,05
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	91,20
Net Interest Margin (NIM)	6,30
Loan to Deposit Ratio (LDR)	137,20
Cash Ratio	31,57

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Usaha debitur menurun dan karakter debitur jelek
Langkah Penyelesaian	Penagihan, Take Over, Lelang

Jumlah kredit yang disalurkan 22.054.190.994, dengan jumlah KL 1.080.959.027 Diragukan 1.192.016.841 Macet 2.989.023.967. Sehingga NPL 23,86%

Form A.03.05

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh seraca Signifikan dan Perubahan Penting Lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh seraca Signifikan :

- Aktivitas utama PT. BPR Wuni Artha Utama adalah sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari pihak-pihak masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
 - i. Kredit
 - Penyaluran kredit pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding pencapaian kredit tahun 2023.
 - ii. Penghimpunan Dana
 - Penghimpunan dana berupa deposito tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Sementara untuk tabungan juga mengalami penurunan dibanding tahun 2023.
- Jumlah Aset PT BPR Wuni Artha Utama pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023.
- Pada Tahun 2024 PT BPR Wuni Artha Utama tidak ada penambahan atau pengurangan kegiatan usaha.
- Pada tahun 2024 jumlah kantor PT. BPR Wuni Artha Utama ada 1 (satu) yaitu 1 (satu) Kantor Pusat yang berlokasi di Jl Raya Klaten- Solo, Meger, Ceper, Klaten dengan status sewa 3 tahun atau jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2025.

Perubahan Penting Lainnya :

- Terdapat penambahan modal disetor senilai 1,3 Milyar dari pemegang saham.
- Pengunduran diri Bapak Guntur Wijayanto, SE sebagai Direktur Utama pada bulan Juni 2024, menyebabkan kekosongan jabatan Direktur Utama, sehingga berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan secara umum.
- Di Tahun 2024 tidak ada perubahan- perubahan penting lain mengenai perubahan penting BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang terjadi di PT BPR Wuni Artha Utama yang mempengaruhi kinerja dan operasional BPR terkait kondisi perekonomian dan/atau kebijakan pemerintah.

Form A.04.00

Strategi dan Kebijakan Manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

1. Usaha penghimpunan dana dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
 - a. Meningkatkan dan mempererat hubungan (Maintenance) dengan nasabah exist agar bersedia menempatkan dana lebih banyak di BPR dengan cara memberikan souvenir.
 - b. Ekspansi mencari nasabah baru dengan cara memperbanyak promosi (Iklan, brosur), Canvasing dan meminta referensi dari nasabah lama/ exist.
 - c. Memasarkan tabungan kolektif melalui sekolah, perkantoran dan perusahaan yang berlokasi disekitar BPR.
 - d. Service Excellence/ Service terhadap nasabah ditingkatkan sehingga membuat nasabah merasa aman dan nyaman menempatkan dana di BPR.
 - e. Cross selling, dengan cara menawarkan pembukaan rekening terhadap nasabah kredit.
 - f. Menawarkan kepada nasabah tabungan jasa payment point.

Pada posisi akhir bulan Desember 2024 deposito mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena adanya pencairan deposito dari masyarakat.

2. Memperhatikan adanya persaingan baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank, kami membuat strategi marketing kredit :
 - a. Melakukan Top up terhadap nasabah kredit Exist secara selektif.
 - b. Ekspansi mencari nasabah baru dengan cara memperbanyak promosi (Iklan, brosur), Canvasing dan meminta referensi dari nasabah lama/exist.
 - c. Service Excellence dengan Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat.
 - d. Menentukan suku bunga kredit yang kompetitif.
 - e. Memasarkan kredit karyawan secara kolektif pada beberapa perusahaan disekitar lokasi BPR

3. Identifikasi & Pengendalian Resiko

1). Resiko Kredit

- Proses pemberian kredit sesuai SOP yang berlaku yang ada dimana permohonan kredit yang ada diproses dengan dimulai dari pengumpulan data sekaligus verifikasi data dan informasi lingkungan oleh Account Officer, kemudian dilanjutkan dengan permohonan SLIK OJK, di Lembar permohonan SLIK OJK yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Debitur dan Pasangan dimana lembar permohonan harus sepersetujuan Direktur Utama. Bilamana Hasil SLIK sudah sesuai dengan standar ketentuan maka akan dilanjutkan dengan kunjungan di Kediaman, Usaha, dan Jaminan oleh Komite Kredit sesuai dengan pemegang limit BMPK. Jaminan BPKB kendaraan bermotor maka wajib dilakukan pengecekan BPKB & STNK dengan Fisik dan Rangka kendaraan yang dijamin. Untuk Nilai Pasar dicarikan informasi pada harga di Dealer dan/atau informasi internet. Untuk jaminan SHM wajib dilakukan pengecekan lokasi dan fisik jaminan, kemudian cek lingkungan terkait jaminan serta informasi nilai pasar, transaksi terakhir, dan/atau informasi harga tanah dari kantor kelurahan setempat dan kemudian dilakukan pengecekan oleh Notaris. Bilamana Factor 5C telah terpenuhi maka akan dilakukan

pengambilan keputusan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas limit BMPK yang dipegang. Alur Proposal Kredit dari Account Officer dan/atau Koordinator Pemasaran diusulkan kepada PE Pemasaran Dana & Kredit kemudian dilanjutkan persetujuan oleh Direktur Utama. Sesuai dengan keputusan Direktur Utama baik disetujui atau ditolak harus dibuatkan SK kemudian diberitahukan kepada calon debitur. Apabila diterima dan calon debitur setuju dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SK, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit sekaligus disiapkan surat pengantar notaris untuk pengikatan jaminan.

- Sebelum calon debitur menandatangani PK, maka seluruh pasal dalam perjanjian wajib dibacakan lebih dahulu oleh notaris atau oleh admin kredit kepada calon debitur dengan jelas, sehingga calon debitur tahu berapa plafond kreditnya, berapa biayanya kemudian kapan dan berapa harus mengangsur setiap bulan sampai jatuh tempo. Dan kepada debitur diberikan kartu angsuran sebagai pegangan debitur yang dibawa saat mengangsur.
- Setiap 2 bulan setelah realisasi, PE Audit Intern melakukan on the spot ke debitur tentang penggunaan kredit.
- Pembentukan PPAP setiap akhir bulan dibentuk sesuai ketentuan.
- Untuk debitur menunggak terus ditagih dengan membawa surat tagihan dan mencari solusi penyelesaiannya. Apabila terjadi penurunan kualitas kredit, maka penagihan dilakukan lebih intensif dan diberikan Surat Peringatan I sampai dengan ke III dan dilanjutkan dengan lelang jaminan melalui KPKNL maupun Pengadilan, penjualan jaminan secara sukarela oleh Debitur.
- Upaya reminder kepada debitur sebelum jatuh tempo angsuran supaya angsuran masuk sesuai jadwal angsuran.
- Untuk kredit yang macet tetap dilakukan penagihan. Namun untuk beberapa kasus diusulkan hapus buku dan terus diupayakan penagihannya, termasuk kredit pension dan umum dengan plafon kecil.
- Dengan demikian pemberian kredit sesuai dengan SOP dan ketentuan-ketentuan yang ada diharapkan resiko bisa diminimalisir. Bahkan kalau terjadi resiko macet bisa diselesaikan dengan cara lelang melalui Pengadilan & KPKNL, penjualan jaminan secara sukarela.

2). Resiko Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. BPR Wuni Artha Utama telah mempunyai struktur organisasi yang bekerja sesuai job descriptionnya masing-masing. Dalam menjalankan fungsinya sudah disiapkan SOP di setiap lini dengan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku disamping kebijakan-kebijakan Direksi.

Dengan berfungsinya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal maka kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional bisa diketahui secara dini dan segera diadakan penyesuaiannya.

Berbagai macam resiko operasional antara lain :

a. Resiko SDM

- Dalam recruitmen karyawan, Bank selalu melakukan langkah-langkah antara lain referensi calon karyawan, wawancara, praktek lapangan, penempatan sesuai dengan jobnya.
- Dalam menjalankan tugasnya setiap hari, karyawan khususnya marketing membuat buku kunjungan yang dipertanggungjawabkan kepada PE Pemasaran.
- Evaluasi kinerja setiap bulan sekali.

- Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, diadakan doa bersama dengan harapan bahwa semua karyawan dalam bekerja akan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Resiko IT

Untuk mengantisipasi terjadinya resiko hilangnya data, Bank selalu melakukan Back Up data setiap hari & menyimpannya pada harkdisk eksternal. Terdapat 2 (dua) unit Hardisk Eksternal, untuk penyimpanan Hardisk eksternal setiap harinya 1 (satu) unit dibawa pulang oleh PE Operasional dan yang 1 (satu) unit disimpan di dalam Brankas.

c. Resiko penghimpunan dana

Kepada nasabah setiap akhir bulan secara rutin diberitahukan saldo tabungan 25 nasabah terbesar melalui sms dan surat pemberitahuan.

d. Resiko Arus Kas

- Bank telah bekerjasama dengan Asuransi Wahana Tata untuk mengcover resiko uang dalam kasir, uang dalam brankas, uang dalam perjalanan ketika setor atau ambil ke Bank lain. Terdapat 2 (dua) buah Kunci brankas yang setiap harinya dibawa oleh Direktur dan PE Operasional.
- Keamanan file kredit selama ini disimpan di filling cabinet yang dikelola oleh Admin Kredit, siapapun yang akan pinjam harus melalui Admin Kredit. Untuk perjanjian kredit asli disimpan didalam brankas.

e. Resiko Pembukuan

- Untuk mengantisipasi resiko salah input, setiap hari mutasi baik kas maupun non kas diperiksa oleh PE Operasional dan PE Audit Intern.

3). Resiko Kepatuhan

PT BPR Wuni Artha Utama menjalankan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PE Kepatuhan dibawah Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan aktif dalam penerapan fungsi kepatuhan secara menyeluruh.



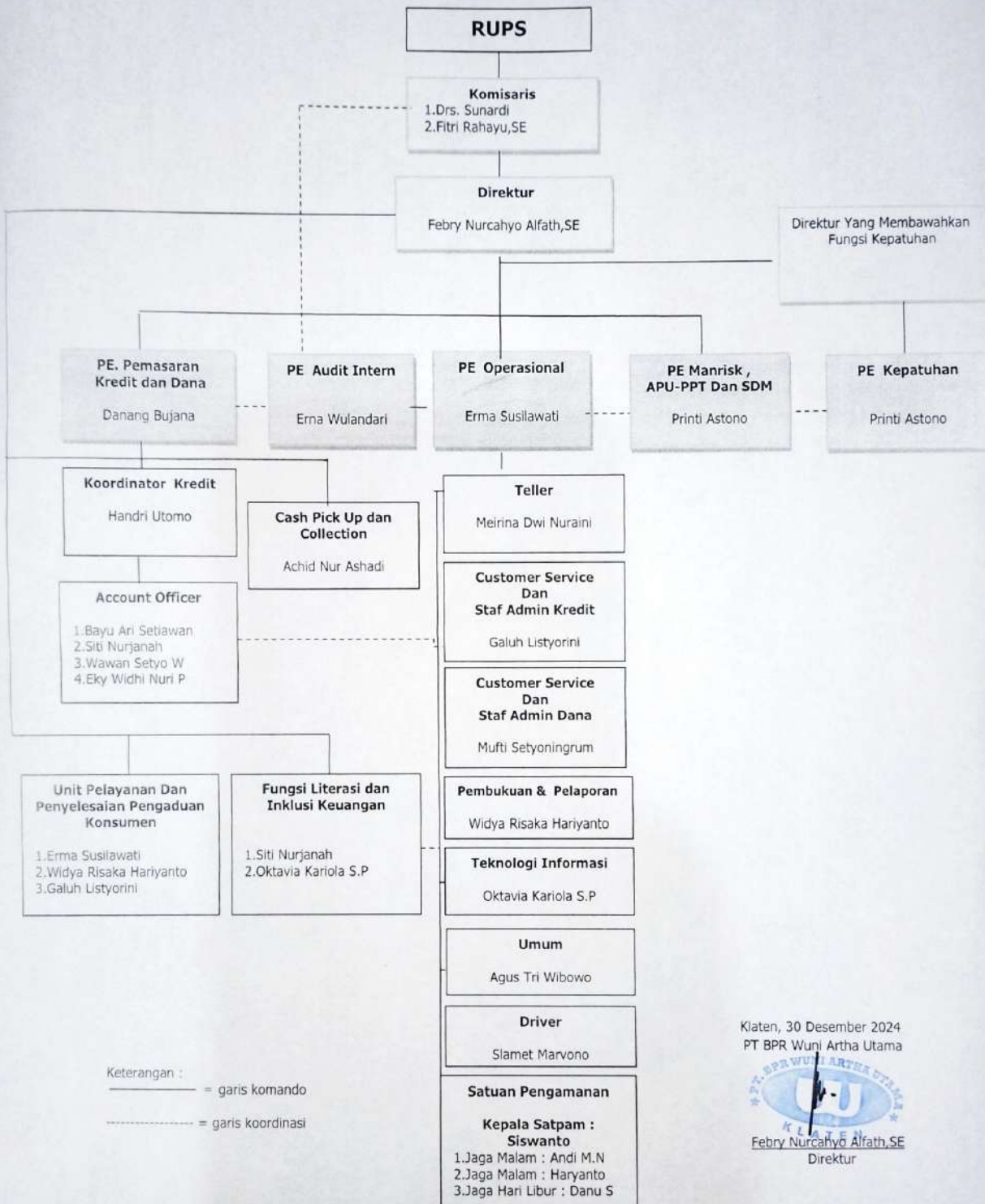
PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo, Meger, Ceper, Klaten Telp./Fax : (0272) 331032

E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI Nomor:189/SDM/BPR-WAU/XII/2024

Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Wuni Artha Utama



Klaten, 30 Desember 2024
PT BPR Wuni Artha Utama



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan	Tabungan Umum dan Simpel
01	01	Deposito	Deposito Berjangka 06,12 Bulan
02	01	Kredit	Investasi, Modal, Kerja, Konsumtif

Keterangan Footer 0502

Form A.05.03**Teknologi Informasi**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pada bulan September 2022 PT. BPR Wuni Artha Utama menjalin kerjasama dengan PT Penta Media Informasi untuk sistem operasional (corebanking). Meskipun masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi oleh vendor, namun secara umum system berjalan dengan lancar dan support untuk pembuatan Lapbul Apolo maupun laporan SLIK.

Form A.05.04

Perkembangan dan Target Pasar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

- Persaingan usaha Lembaga keuangan di wilayah Klaten cukup ketat. Ada 15 BPR yang berkantor pusat di Klaten ditambah kantor cabang BPR dan Bank Umum yang beroperasi di area Klaten dan sekitarnya. Hal ini menuntut OJK melakukan pembinaan dan pengawasan agar persaingan usaha bisa berjalan dengan adil dan merata.
- Masuknya bank umum dan Lembaga keuangan dengan modal kuat yang beroperasi di segmen mikro (Misal: Mandiri Mitra Usaha) dan penyaluran KUR melalui bank milik pemerintah membuat daya saing BPR menurun. Apabila BPR tidak kreatif dan kurang mendapat dukungan pemerintah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak BPR yang kesulitan berkembang.
- Namun dengan strategi pemasaran yang kami lakukan, PT. BPR Wuni Artha Utama masih mampu menjalankan fungsi bank dengan baik yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit walaupun dengan pertumbuhan yang rendah.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		
001	PT BPR WUNI ARTHA UTAMA	-7.67407,110.65367	Jl. Raya Klaten-Solo Km.8, Meger	Ceper	0923	57465	FEBRY NURCAHO ALFATH, SE	(0272) 331032

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						
0	0	5	7	2	0	0	0	2	1	4	0	0	01	0	0	0	0

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai						
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya
0	0		4					7	7	0	2	5	0

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan
Pelayanan Kas

Tanggal Pelaksanaan

Sandi Kantor Kendali

Tanggal Persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
SPBU 44.574.14	Kredit	perjanjian kerjasama No:085A/Sekrt-WAU/V/2023 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025	08-05-2023
CV Debough	Kredit	perjanjian kerjasama No:038/Sekrt-WAU/III/2024 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026	28-03-2024
PT Alis Jaya Ciptatama	Kredit	perjanjian kerjasama No:161/Sekrt-WAU/XII/2024 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2026	13-12-2024

Keterangan : Footer

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	9
2. Pelayanan	12
3. Lainnya	0
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	14
2. Pegawai Tidak Tetap	7
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	0
3. S1	7
4. D3	8
5. SMA	6
6. Lainnya	0
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	12
2. Perempuan	9
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	0
2. Usia 26-35 tahun	5
3. Usia 36-45 tahun	9
4. Usia 46-55 tahun	6
5. Usia >55 tahun	1

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Pelatihan Penyusunan Laporan Bulanan BPR 2025	15-01-2024	02	01	2	Pengenalan CKPN dan Praktek Uji Coba
Workshop Perlindungan Konsumen dan Penilaian KAP	05-02-2024	02	01	2	Webinar tentang SIPENDAR
Koordinasi Tindak Lanjut Registrasi Aplikasi System Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	16-02-2024	02	02	2	Workshop Perlindungan Konsumen dan Penilaian KAP
Sosialisasi SPRINT Modul PKK BPR	26-06-2024	02	02	1	Sosialisasi SPRINT Modul PKK BPR
Selling Skills Enhancement dan Strategi Marketing in Smart Society	02-07-2024	02	01	6	Pelatihan Motivasi AO
Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana TPPU	07-07-2024	02	03	1	Webminar Penanganan Kejahatan Siber sebagai Tindak Pidana TPPU
Workshop Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)	10-07-2024	02	03	1	Workshop SAK EP
Sosialisasi Sertifikat Tanah secara Elektronik	10-07-2024	02	03	1	Sosialisasi Sertifikat Tanah secara Elektronik
Pelatihan Audit Internal	23-07-2024	02	03	2	Pelatihan Audit Internal
Webminar sosialisasi ketentuan perbankan	24-08-2024	02	03	1	Sosialisasi ketentuan yang ada di tahun 2024
Webminar Pemaparan dampak perubahan ketentuan terhadap laporan Bulanan BPR	24-09-2024	02	01	1	Workshop pemaparan dampak perubahan ketentuan terhadap laporan bulanan
Seminar prospek perbankan tahun 2025	14-10-2024	02	02	1	Seminar proses perbankan
Evaluasi kinerja dan sosialisasi BPR/S Diwilayah Kantor OJK Solo	11-11-2024	02	02	1	Pemaparan tentang industri BPR
Seminar LPS Penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) terintegrasi guna menghadapi tantangan di industri perbankan	14-11-2024	02	03	1	Seminar tentang penerapan Governance, Risk and Compliance
Aspek Hukum Penyesuaian Perjanjian Baku	25-11-2024	02	01	1	Pelatihan tentang pembuatan Perjanjian Baku dilihat dari aspek hukum
Undangan Edukasi Coretax Kepada Wajib Pajak	03-12-2024	02	03	1	Edukasi Coretax Kpada Wajib Pajak

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Webminar Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK Tahun 2024	04-12-2024	02	01	1	Implementasi Enhancement Pelaporan SLIK
Webminar Aspek hukum perkreditan segmentasi UKM BPR	12-12-2024	02	03	1	Workshop Aspek Hukum

SDM Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah	208.641.350	82.240.550
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Penempatan pada Bank Lain	7.005.925.566	7.934.140.641
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	912
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	22.054.190.994	24.601.217.446
-/- Provisi Belum Diamortisasi	87.833.557	109.829.839
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	31.756.044	40.663.089
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	134.549.914	211.093.551
Penyertaan Modal	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Agunan yang diambil alih	160.000.000	0
Properti Terbengkalai	0	
Aset Tetap dan Inventaris	916.915.800	967.225.650
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	773.343.787	777.144.562
Aset Tidak Berwujud	56.810.000	56.810.000
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	38.039.175	27.714.171
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Aset Lainnya	265.615.479	625.257.957
TOTAL ASET	29.602.576.712	33.100.446.120
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	21.274.714	40.862.152
Simpanan		
a. Tabungan	6.183.004.057	7.105.159.730
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	9.803.800.000	10.529.300.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	2.000.000.000	2.300.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	1.472.581.410
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	337.398.922	612.703.494
TOTAL LIABILITAS	18.345.477.693	22.060.606.786
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	700.000.000	2.000.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	1.670.935.130	1.468.129.462
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	0	557.681.532
b. Tahun Berjalan	286.163.889	1.014.028.340
TOTAL EKUITAS	11.257.099.019	11.039.839.334

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	3.585.447.785	4.927.466.592
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	0	612.780
Tabungan	76.123.484	37.932.538
Deposito	93.184.530	16.903.889
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	2.716.418.017	3.906.531.896
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	111.650.782	213.906.745
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	1.100.000	12.151.200
e Pemulihan CKPN	159.585.677	115.568.219
f Dividen	0	
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	
h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	8.993.700
j Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya	427.385.295	623.859.325
Beban Operasional	3.269.988.596	3.791.278.812
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	240.838.886	238.936.960
ii. Deposito	648.247.671	589.645.199
iii. Simpanan dari bank lain	143.671.269	248.414.539
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	46.285.060	175.769.828
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	40.410.390	38.592.417
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	11.945.835	7.958.354
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	373.217	4.378.245
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	82.667.911	151.557.593
d. Penyertaan Modal	0	
e. Aset Keuangan Lainnya	0	
4 Beban Pemasaran	33.274.000	21.046.100
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	1.164.427.309	1.082.187.260
ii. Honorarium	296.636.200	347.579.200
iii. Lainnya	138.953.295	378.177.162
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	54.238.308	80.960.184
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor	0	45.000.000
ii. Lainnya	50.414.600	6.161.100
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	84.547.075	84.146.010
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10.325.004	10.325.004
f Beban Premi Asuransi	8.804.254	15.326.318
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	42.877.129	37.859.038
h Beban Barang dan Jasa	118.371.253	189.131.501
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal	0	
b. Kejahatan eksternal	0	
k Pajak-pajak	8.135.082	6.290.000
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	
d Kerugian penjualan AYDA	0	0
e Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f Lainnya	44.544.848	31.836.800
Laba (Rugi) Operasional	315.459.189	1.136.187.780
Pendapatan Non Operasional	11.733.272	20.742.447
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	475.000
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	11.733.272	11.273.747
Beban Non Operasional	5.660.000	13.339.035
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	5.660.000	13.339.035
Laba (Rugi) Non Operasional	6.073.272	7.403.412
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	321.532.461	1.143.591.192
Taksiran Pajak Penghasilan	35.368.572	129.562.852
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	286.163.889	1.014.028.340
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	286.163.889	1.014.028.340

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	517.506.427	213.235.000
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga		
4) Lainnya		
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	67.215.500	68.315.500
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	84.811.850	88.891.850
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
Saldo per 31 Des Tahun T-2	8.000.000.000	0	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	1.300.000.000	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T-1	9.300.000.000	0	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T	9.300.000.000	0	0	0	0

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan	Jumlah
0	0	1.468.129.462	1.571.709.872	11.039.839.334
0	0	0	(1.267.501.370)	(1.267.501.370)
0	0	202.805.668	(202.805.668)	0
0	0	0	0	1.300.000.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	286.163.889	286.163.889
0	0	0	(101.402.834)	(101.402.834)
0	0	1.670.935.130	286.163.889	11.257.099.019
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1.670.935.130	286.163.889	11.257.099.019

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	0	0
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	2.735.739.051	3.860.886.663
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	111.650.782	213.906.745
Pembayaran beban bunga	(288.336.961)	(395.970.380)
Beban gaji dan tunjangan	0	0
Beban umum dan administrasi	0	0
Beban operasional lainnya	0	0
Pendapatan non operasional lainnya	160.685.677	127.719.419
Beban non operasional lainnya	0	0
Pembayaran pajak penghasilan	(35.368.572)	(129.562.852)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	0	0
Kredit yang diberikan	0	0
Agunan yang diambil alih	(46.509.075)	(55.451.010)
Aset lain-lain	(105.155.478)	2.471.025

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(19.522.352)	8.155.533
Tabungan	0	0
Deposito	(1.472.581.410)	(810.192.010)
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	(275.304.572)	225.451.775
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	765.297.090	3.047.414.908
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	0	0
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	0	0
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	1.300.000.000	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	(1.014.028.340)	(904.094.307)
Penyesuaian lainnya	(354.875.864)	738.500.394
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(68.904.204)	(165.593.913)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	696.392.886	2.881.820.995
Kas dan setara Kas awal periode	82.240.550	95.674.900
Kas dan setara Kas akhir periode	778.633.436	2.977.495.895

Form C.01.00

Laporan Akuntan Publik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WUNI ARTHA
UTAMA**

**LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2024

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
▪ Surat Pernyataan Direksi	
▪ Laporan Keuangan	
▪ Neraca	1 - 2
▪ Laporan Laba Rugi	3
▪ Laporan Perubahan Ekuitas	4
▪ Laporan Arus Kas	5
▪ Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 39
▪ Lampiran	
▪ Laporan Auditor Independen	

LAPORAN KEUANGAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
NERACA

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
Kas	2.c, 3.1	208.641.350	82.240.550
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2.d, 3.2	238.770.412	299.727.587
Penempatan pada Bank Lain	2.e, 3.3	7.005.925.566	7.934.140.641
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	2.g, 3.3	-	(912)
Total		<u>7.453.337.328</u>	<u>7.934.139.729</u>
Kredit yang Diberikan	2.f, 3.4	22.054.190.994	24.601.217.446
Provisi & Administrasi	2.f, 3.4	(87.833.557)	(109.829.839)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	2.f, 3.4	(31.756.044)	(40.663.089)
PPAP Kredit Yang Diberikan	2.g, 3.4	(134.549.914)	(211.093.551)
Total		<u>21.800.051.479</u>	<u>24.239.630.967</u>
Agunan Yang Diambil Alih		160.000.000	-
Aset Tetap dan Inventaris	2.i, 3.5	916.915.800	967.225.650
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Inventari	2.i, 3.5	(773.343.787)	(777.144.562)
Total		<u>143.572.013</u>	<u>190.081.088</u>
Aset Tidak Berwujud	2.j, 3.6	56.810.000	56.810.000
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.j, 3.6	(38.039.175)	(27.714.171)
Total		<u>18.770.825</u>	<u>29.095.829</u>
Aset lain-lain	2.k, 3.7	26.845.067	325.530.370
JUMLAH ASSET		<u><u>29.602.576.712</u></u>	<u><u>33.100.446.120</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
NERACA**

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2.l, 3.8	21.274.714	40.862.152
Utang Bunga	2.m, 3.9	26.303.978	31.691.039
Utang Pajak	2.n, 3.10	-	19.562.852
Simpanan	2.o, 3.11		
Tabungan		6.183.004.057	7.105.159.730
Deposito Berjangka		9.803.800.000	10.529.300.000
Simpanan Dari Bank Lain	2.p, 3.12	2.000.000.000	2.300.000.000
Pinjaman Diterima	2.q, 3.13	-	1.472.581.410
Kewajiban Imbalan Kerja	2.r, 3.14	96.597.855	324.686.411
Kewajiban Lain-lain	2.s, 3.15	214.497.089	236.763.192
Jumlah Kewajiban		18.345.477.693	22.060.606.786
EKUITAS			
Modal			
Modal Dasar	2.t, 3.16	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Belum Disetor		(700.000.000)	(2.000.000.000)
Modal Disetor		9.300.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba			
	2.u, 3.16		
- Cadangan Umum		1.670.935.130	1.468.129.462
- Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya:			
- Laba (Rugi) Tahun Lalu		-	557.681.532
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		286.163.889	1.014.028.340
Jumlah Saldo Laba		1.957.099.019	3.039.839.334
Jumlah Ekuitas		11.257.099.019	11.039.839.334
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.602.576.712	33.100.446.120

Klaten, 5 Maret 2025
Atas nama dan mewakili direksi,



Febry Nurcahyo Alfath, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2.v, 3.17		
Bunga Kontraktual		2.885.726.031	3.961.981.103
Provisi Dan Jasa Administrasi		111.650.782	213.906.745
Koreksi Atas Pendapatan Bunga		-	-
Jumlah Pendapatan Bunga		2.997.376.813	4.175.887.848
Beban Bunga	2.w, 3.19	(1.131.399.111)	(1.299.317.297)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.v, 3.18	588.070.972	751.578.744
Jumlah Pendapatan Operasional		2.454.048.674	3.628.149.295
Beban Operasional	2.w		
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3.20		
Penempatan Pada Bank Lain		-	4.378.245
Kredit Yang Diberikan		83.041.128	151.557.593
Beban Pemasaran	3.21	33.274.000	21.046.100
Beban Administrasi dan Umum	3.22	1.977.729.509	2.283.142.777
Beban Operasional Lainnya	3.23	44.544.848	31.836.800
Jumlah Beban Operasional		2.138.589.485	2.491.961.515
Laba (Rugi) Operasional		315.459.189	1.136.187.780
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	2.x, 3.24	11.733.272	20.742.447
Beban Non Operasional	2.y, 3.24	(5.660.000)	(13.339.035)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		6.073.272	7.403.412
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		321.532.461	1.143.591.192
Taksiran Pajak Penghasilan	2.z, 3.25	35.368.572	129.562.852
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		286.163.889	1.014.028.340

Klaten, 5 Maret 2025
Atas nama dan mewakili direksi,



Febry Nurcahyo Alfath, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Febry Nurcahyo Alfath, SE
Alamat KTP : Puro Asri RT 022 RW 010 Puro Karangmalang Sragen
Telepon : 082221538318
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama PT. BPR Wuni Artha Utama, kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama.
2. Laporan keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT. BPR Wuni Artha Utama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. BPR Wuni Artha Utama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Klaten, 05 Maret 2025

PT. BPR Wuni Artha Utama



Febry Nurcahyo Alfath, SE
Direktur

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL DISETOR	SALDO LABA		JUMLAH
		CADANGAN UMUM	SALDO LABA BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo per 31 Desember 2022 Audited	8,000,000,000	1,287,310,600	904,094,307	10,191,404,907
Cadangan Umum		180,818,862	(180,818,862)	-
Jasa Pengurus			(36,163,772)	(36,163,772)
Jasa Karyawan			(36,163,772)	(36,163,772)
Dana Sosial			(9,040,943)	(9,040,943)
CSR			(9,040,943)	(9,040,943)
Dividen			(75,184,483)	(75,184,483)
Laba (rugi) Tahun Berjalan			1,014,028,340	1,014,028,340
Saldo per 31 Desember 2023 Audited	8,000,000,000	1,468,129,462	1,571,709,872	11,039,839,334
Modal Disetor	1,300,000,000			1,300,000,000
Cadangan Umum		202,805,669	(202,805,669)	-
Jasa Pengurus			(40,561,134)	(40,561,134)
Jasa Karyawan			(40,561,134)	(40,561,134)
Dana Sosial			(10,140,283)	(10,140,283)
CSR			(10,140,283)	(10,140,283)
Dividen			(1,267,501,370)	(1,267,501,370)
Laba (rugi) Tahun Berjalan			286,163,889	286,163,889
Saldo per 31 Desember 2024 Audited	9,300,000,000	1,670,935,130	286,163,888	11,257,099,019

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba Neto	286,163,889	1,014,028,340
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	(3,800,775)	36,395,010
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :		
Penempatan Pada Bank Lain	(912)	912
Kredit Yang Diberikan	(76,543,637)	33,716,207
Amortisasi		
Provisi	(21,996,282)	(99,935,445)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	(8,907,045)	31,814,901
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10,325,004	10,325,004
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	60,957,175	(47,702,806)
Penempatan Pada Bank Lain	928,215,075	(5,432,156,565)
Kredit Yang Diberikan	2,547,026,452	3,884,684,163
Agunan Yang Diambil Alih	(160,000,000)	-
Aset Lain-lain	298,685,303	(194,327,308)
Kewajiban Segera	(19,587,438)	8,184,614
Utang Bunga	(5,387,061)	5,005,663
Utang Pajak	(19,562,852)	(14,492,435)
Simpanan		
Tabungan	(922,155,673)	553,516,771
Deposito Berjangka	(725,500,000)	1,419,300,000
Simpanan Dari Bank Lain	(300,000,000)	(500,000,000)
Pinjaman Diterima	(1,472,581,410)	(810,192,010)
Kewajiban Imbalan Kerja	(228,088,556)	238,821,651
Kewajiban Lain - Lain	(22,266,103)	(3,883,104)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	144,995,154	133,103,563
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/ penjualan Aset Tetap dan inventaris	50,309,850	19,056,000
Pembelian/ penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	50,309,850	19,056,000
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Modal Disetor	1,300,000,000	-
Jasa Pengurus	-	(36,163,772)
Jasa Karyawan	-	(36,163,772)
Dana Sosial	-	(9,040,943)
CSR	-	(9,040,943)
Dividen	-	(75,184,483)
Penambahan Cadangan Umum	202,805,668	180,818,862
Laba Ditahan	(1,571,709,872)	(180,818,862)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(68,904,204)	(165,593,913)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS	126,400,800	(13,434,350)
KAS AWAL PERIODE	82,240,550	95,674,900
KAS AKHIR PERIODE	208,641,350	82,240,550

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT BPR Wuni Artha Utama menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Wuni Artha Utama mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan oleh perseroan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

- Dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (*historical cost*), kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor

c. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.

Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1. Giro pada bank umum

Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

4. Sertifikat deposito

merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

5. Penempatan pada bank syariah

merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

f. Kredit Yang Diberikan - Lanjutan

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

g. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Kredit :

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dihitung dari jumlah prosentase tertentu dengan mempertimbangkan nilai agunan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar
2. 3 % dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
3. 10% dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
4. 50% dari aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
5. 100% dari aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Peraturan yang mengatur penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Penghapusbukuan Kredit (*Hapus Buku*) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

Penghapusan Hak Tagih Kredit (*Hapus Tagih*) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

Penempatan pada bank lain :

Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat.

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

- a. lancar, dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga;
- b. kurang lancar, dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja;
- c. macet, dalam hal:
 - 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja;
 - 2) bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus;
 - 3) bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah dilikuidasi.

h. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

i. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (*cost*) dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

k. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca

l. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

m. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

n. Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

o. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

p. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

a. Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.

b. Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.

q. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

r. Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerjaan pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan..

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

s. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

t. Modal

1. Modal Disetor

- Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-
- Modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a) Jumlah uang yang diterima.
 - b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

t. Modal ~ lanjutan

1. Modal Disetor ~ lanjutan

- Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

2. Tambahan Modal Disetor (*Agio Saham*)

- Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
 - a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
 - b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

3. Modal Sumbangan

- Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
- Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
- Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas)

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

u. Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
2. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - laba rugi periode berjalan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

v. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

w. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

x. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

y. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

z. Taksiran Pajak penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas

Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut ini:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas		
- Kas Besar	208.641.350	82.240.550
Saldo Kas	<u>208.641.350</u>	<u>82.240.550</u>

3.2 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima per 31 Desember masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		
- Kredit yang diberikan	236.816.783	299.588.474
- Penempatan Pada Bank Lain	1.953.629	139.113
Saldo Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	<u>238.770.412</u>	<u>299.727.587</u>

3.3 Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terinci berikut ini:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Giro Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Norek 1.009.00898.1	210.340.891	210.460.891
Saldo Giro	210.340.891	210.460.891
Tabungan Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT. Bank Mandiri Tbk Norek 138.00.0630271.0	1.575.808.557	1.939.109.783
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Norek 2.009.01498.8	520.741.643	1.453.991.130
- PT. BPD Bank Jawa Barat dan Banten Tbk 008.0870.833.100	1.917.518.566	1.800.396.385
- PT. Bank Muamalat Norek 526.001.295.0	1.251.515.909	2.000.182.452
Saldo Tabungan	5.265.584.675	7.193.679.750
Deposito Berjangka Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng (APEX) No Bilyet 105230	30.000.000	30.000.000
- PT. BPR Ceper No Bilyet 001418	1.000.000.000	500.000.000
- PT. BPR Kedung Arto	500.000.000	-
Saldo Deposito Berjangka	1.530.000.000	530.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	<u>7.005.925.566</u>	<u>7.934.140.641</u>
Pembentukan Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain	-	(912)
Adapun rincian pembentukan penyisihan penempatan pada bank lain adalah :		
Saldo Awal tahun	(912)	-
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan		(4.378.245)
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	912	4.377.333
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>(912)</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.4 Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 terinci berikut ini:

	2024	2023
Kredit Yang Diberikan Kepada pihak III terdiri dari:		
- Kredit Umum	21.815.878.360	24.201.308.784
- Kredit Pensiun	-	3.198.796
- Kredit Karyawan Umum	236.164.800	390.534.032
- Kredit Deposito PNM	2.147.834	6.175.834
Saldo Kredit Yang Diberikan	22.054.190.994	24.601.217.446

Kredit Yang Diberikan berdasarkan kolektibilitas terdiri dari:

- Lancar	10.080.444.444	15.457.049.657
- Dalam Perhatian Khusus	6.711.746.715	7.917.669.459
- Kurang Lancar	1.080.959.027	-
- Diragukan	1.192.016.841	451.333.330
- Macet	2.989.023.967	775.165.000
Saldo Kredit Yang Diberikan	22.054.190.994	24.601.217.446

Kredit berdasarkan sektor ekonomi

- Rumah Tangga Untuk Pemilikan Furnitur Dan Peralatan Rumah Tangga	-	17.525.900
- Rumah Tangga Untuk Pemilikan Peralatan Lainnya	1.407.107.211	1.839.178.099
- Rumah Tangga Untuk Keperluan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	10.000.000	3.198.796
- Bukan Lapangan Usaha Lainnya	701.523.512	1.085.322.342
- Pertanian Buah pisang	147.500.000	150.000.000
- Pertanian Padi	470.066.951	149.830.943
- Peternakan Unggas	98.599.000	41.788.122
- Peternakan Domba & Kambing	15.586.000	79.083.100
- Penangkapan Ikan Lainnya	3.165.000	5.165.000
- Peternakan Lainnya	172.731.618	-
- Jasa Budidaya ikan laut	-	565.000.000
- Industri Tempe Dan Tahu Kedelai	122.265.000	154.485.000
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	850.000.000	-
- Industri Produk Makanan Lainnya	56.329.900	62.833.400
- Industri Pemintalan, Penunuan Dan Penyelesaian Akhir Tekstil	-	64.580.000
- Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	-	187.115.000
- Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	363.889	100.763.116
- Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, sejenisnya	-	26.735.511
- Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya	-	49.339.205
<i>Jumlah pindahan</i>	4.055.238.081	4.581.943.534

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.4 Kredit yang Diberikan- Lanjutan

<i>Jumlah dipindahkan</i>	4.055.238.081	4.581.943.534
- Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	-	3.324.000
- Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat	-	98.950.000
- Industri Barang Tanah Liat / Keramik Bukan Bahan Bangunan	114.167.500	49.165.000
- Industri Pegecoran Besi Dan Baja	43.749.700	-
- Industri Pegecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	-	64.583.336
- Industri Semen, Kapur dan Gips	90.000.000	-
- Industri Pengolahan Lainnya	2.020.347.523	431.219.411
- Konstruksi Perumahan Sederhana Lainnya Tipe S.D. 21	-	-
- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Lainnya	41.200.000	295.282.998
- Penyewaan Alat Kontruksi	-	349.518.154
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	39.086.000	49.000.000
- Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko	68.808.500	104.988.500
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau di Toko	13.037.647.942	14.746.259.874
- Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko	126.116.000	-
- Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Lainnya di Toko	-	882.471.916
- Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	250.000.000	-
- Angkutan Darat Untuk Barang	128.128.100	144.298.900
- Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	394.818.600	465.534.600
- Penyediaan Akomodasi Lainnya	1.480.612	38.980.612
- Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	-	641.021.512
- Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	17.204.000	27.882.000
- Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	-	1.759.112
- Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	1.626.198.436	1.425.033.987
- Real estate Lainnya	-	200.000.000
Saldo Kredit yang Diberikan	22.054.190.994	2.295.696.611

Kredit Yang Diberikan berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:

- Kredit -Terkait	55.831.950	151.832.800
- Kredit - Tidak Terkait	21.998.359.044	24.449.384.646
Saldo Kredit yang Diberikan	22.054.190.994	24.601.217.446

Informasi kredit yang diberikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Hubungan Keterkaitan	Baki Debet
1	1.03.03.05.2337-10	Erna Wulandari	PE Audit Intern	18.749.500
2	1.03.03.05.3572-01	Danang Bujono	PE pemasaran	15.554.700
3	1.03.03.05.4741-06	Febry Nurcahyo Alfath	Direktur	21.527.750
		Total		55.831.950

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.4 Kredit yang Diberikan- Lanjutan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kredit Yang Diberikan-Provisi dan Administrasi terdiri dari:		
- Provisi Kredit Umum	(86.690.664)	(108.003.683)
- Provisi Kredit Pensiun	-	(93.750)
- Provisi Kredit Karyawan Umum	(1.136.354)	(1.647.111)
- Provisi Kredit Deposito PNM	(6.539)	(85.295)
Saldo Provisi dan Administrasi	<u>(87.833.557)</u>	<u>(109.829.839)</u>
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan	<u>(31.756.044)</u>	<u>(40.663.089)</u>
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sejumlah tersebut di atas terdiri dari:		
- PPAP Kredit Yang diberikan	(134.549.914)	(211.093.551)
Saldo Kredit Neto	<u>21.800.051.479</u>	<u>24.239.630.967</u>
Adapun rincian pembentukan penyisihan kredit yang diberikan adalah :		
Saldo Awal tahun	211.093.551	177.377.344
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan	83.041.128	151.557.593
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	(159.584.765)	(111.190.886)
Hapus Buku Kredit yang Diberikan	-	(6.650.500)
Saldo akhir	<u>134.549.914</u>	<u>211.093.551</u>

Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 159/SK-DIR/BPR-WAU/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, tarif bunga pinjaman sebagai berikut:

No	Plafond Pinjaman	Suku Bunga
1	Plafond s/d Rp 50.000.000,-	1,25%
2	Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	1,10%
3	Rp 100.000.000,- sd Rp 200.000.000,-	1,00%
4	=> Rp 200.000.000,-	0,90%

3.4A Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambilalih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Agunan Yang diambilalih	<u>160.000.000</u>	<u>-</u>

No Rekening	Nama	Baki Debit	Keterangan	Tgl Ayda
1.03.03.05.5117-00/01013	Wijayanto	160.000.000	SHM no. 01239, terletak di Desa Ngemplak, Seneng, Kec. Manisrenggo, Kaltan an Wijayanto	30 Agustus 2024

3.5 Aset Tetap dan Inventaris

Rincian dari aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo 31 Des 2023	2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Mutasi Pengurangan	
Harga Perolehan				
Peralatan dan Perlengkapan	485.395.650	17.408.000	88.347.850	414.455.800
Kendaraan	481.830.000	20.630.000	-	502.460.000
Jumlah	967.225.650	38.038.000	88.347.850	916.915.800

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.5 Aset Tetap dan Inventaris ~ Lanjutan

2024				
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Perlengkapan	437.532.093	21.461.230	88.347.850	370.645.473
Kendaraan	339.612.469	63.085.845	-	402.698.314
Jumlah	777.144.562	84.547.075	88.347.850	773.343.787
Nilai Buku	190.081.088			143.572.013

Catatan*)

1. Penambahan Aset Tetap

Penambahan aset tetap tahun 2024, sesuai dengan memo intern no. 076/MEMO-WAU/V/2023 tanggal 28 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal	Harga Perolehan
1	Printer Canon G2770	30-Jan-24	1.940.000
2	Laptop HP 14s-DQ4016TU	30-Jan-24	7.798.000
3	Mesin Penghitung Uang	10-Jun-24	2.070.000
4	AC Samsung AR-12AYHLAWN	8-Jul-24	5.600.000
5	Motor Supra X 125 Hitam Merah Th 2023	12-May-23	20.630.000
	Jumlah		38.038.000

2. Penghapusan dan penjualan Inventaris

Penghapusan serta penjualan inventaris telah sesuai dengan memo intern yang ditandatangani oleh direksi.

Adapun penghapusan inventaris dikarenakan inventaris tersebut mengalami kerusakan. Hal ini tertuang dalam memo intern no. 148-A/BA-WAU/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan no. 011/BA-WAU/I/2024. Berikut rincian inventaris yang dihapusbukukan :

No	Keterangan	Tanggal Perolehan	Harga perolehan
1	Kanopi Atap Twinlef	9/7/2013	11.424.000
2	Korden Kantor	4/12/2006	3.222.900
3	Komputer dan program	4/12/2006	29.750.000
4	1 Buah meja counter dan 4 buah meja	08-06-2009	5.500.000
5	Rak File dan Bangku panjang	21-08-2009	1.100.000
6	Sekat Kaca dan Pintu Alumunium	04-12-2006	12.508.000
7	Inventaris (Fan 18" FE45-CI) Kantor Kas Cawas	27-03-2007	365.200
8	Pure It Marvella	18-Apr-15	2.500.000
9	1 UNIT LAPTOP HP	10/10/2016	6.550.000
10	Mesin Penghitung Uang	25-Aug-18	2.700.000
11	Sekat Kaca Ruang Tengah	11/1/2008	4.514.850
12	Sekat Kaca Aluminium K. Kas	6/8/2009	2.222.900
13	Papan nama Kantor Kas Cawas	6/5/2014	1.800.000
14	Sekat Kaca Kantor Kas	10/5/2014	1.600.000
15	Teralis Besi Kantor kas	19/6/2014	1.250.000
16	Monitor LG Kantor Kas	8/8/2014	790.000
17	UPS APC Kantor Kas	8/8/2016	550.000
	Jumlah		88.347.850

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.5 Aset Tetap dan Inventaris-Lanjutan

Keterangan	2023			Saldo 31 Des 2023
	Saldo	Mutasi		
	31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Inventaris	525.041.650	8.105.000	47.751.000	485.395.650
Kendaraan	461.240.000	20.590.000	-	481.830.000
Jumlah	986.281.650	28.695.000	-	967.225.650

Keterangan	2023			Saldo 31 Des 2023
	Saldo	Mutasi		
	31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris	463.078.744	22.204.349	47.751.000	437.532.093
Kendaraan	277.670.808	61.941.661	-	339.612.469
Jumlah	740.749.552	84.146.010		777.144.562
Nilai Buku	245.532.098			190.081.088

3.6 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aset Tidak Berwujud	56.810.000	56.810.000
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(38.039.175)	(27.714.171)
Saldo Aset Tidak Berwujud	<u>18.770.825</u>	<u>29.095.829</u>

PERJANJIAN KERJASAMA
PT PENTA MEDIA INFORMASI
DENGAN
PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI "PENTA SYSTEM UNTUK BPR"
Nomor: 014/PKS/PM-INFO/IV/2022

Perjanjian kerjasama tentang Implementasi aplikasi Penta System untuk BPR ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 13 April 2022 bertempat di Kab. Sukoharjo, oleh dan antara:

Pihak Pertama/PT. Penta Media Informasi

Nama : Muhammad Rizal, M.Kom dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT. Penta Media Informasi
 Alamat : Perum Sanggrahan Permai, Jl. Benowo 05, No. 14 Makamhaji, Sukoharjo

Pihak Kedua/PT. BPR Wuni Artha Utama

Nama : Guntur Wijayanto, SE dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT. BPR Wuni Artha Utama
 Alamat : Jl. Raya Klaten-Solo Km 8 Meger, Ceper, Klaten
 Objek : Menyusun dan implementasi Penta System versi BPR
 Jangka Waktu : perjanjian implementasi ini berlaku selama 1 tahun yaitu sejak tanggal 13-04-2022 sampai dengan tanggal 12-04-2023
 Biaya : besarnya biaya sistem dan implementasi ditetapkan sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Dibayar Dimuka		-
- Sewa Kantor	3.750.000	53.311.344
- Premi Asuransi	4.585.795	-
Lainnya		
- Biaya Notaris & Asuransi	-	3.908.325
- Biaya Provisi & Administrasi Pinjaman	-	8.037.510
- PPOB	5.240.000	4.607.596
- Biaya Lelang	10.677.510	7.330.000
- DPLK Bank Jateng	-	248.335.595
- Pajak Dibayar Dmuka	2.591.762	-
Saldo Aset Lain-Lain	<u>26.845.067</u>	<u>325.530.370</u>

* **Perjanjian Sewa Menyewa**

Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama/Yang Menyewakan

Nama : Fitri Rahayu, SE.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jambon RT. 16 RW. 07 Desa/Kelurahan Keden, Kecamatan Pedan, Klaten

Pihak Kedua/Penyewa

Nama : Guntur Wijayanto, SE.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Wuni Artha Utama berkedudukan di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 48 Pati RT.011 RW.004 Winong Pati, Pati
Objek Sewa : Bangunan rumah yang berdiri diatas sebagian dari sebidang tanah Hak mllik Nomor: 1090, seluas 405 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Ceper, Kelurahan Meger dan diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-2-1999 Nomor: 2/Meger/1999 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada tanggal 26-07-2011 tercatat atas nama Fitri Rahayu, SE
Jangka Waktu Sewa : Jangka waktu sewa 3 tahun dimulai terhitung pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2025
Nilai Sewa : Rp 135.000.000,- (untuk jangka waktu 3 tahun)

3.8 Kewajiban Segera

Kewajiban Segera per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kewajiban Segera		
- Kewajiban Segera - Pajak Atas Bunga Tabungan PPh Psl 4 (2)	2.849.887	4.279.849
- Kewajiban Segera - Pajak Atas Bunga Deposito PPh Psl 4 (2)	10.391.416	11.031.874
- Kewajiban Segera - Pajak Hadiah Undian	9.000	-
- Titipan Nasabah	12.000	17.269.000
- Kewajiban Segera - Lainnya (BPJS Tenaga Kerja)	4.807.793	5.011.725
- Kewajiban Segera - Lainnya (BPJS Kesehatan)	3.204.618	3.269.704
Saldo Kewajiban Segera	<u>21.274.714</u>	<u>40.862.152</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.9 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Utang Bunga Simpanan Belum Jatuh Tempo	1.814.516	2.794.355
Utang Bunga Deposito Berjangka		
- 3 Bulan	165.994	7.578.722
- 6 Bulan	8.242.790	2.718.806
- 12 Bulan	16.080.678	18.599.156
Saldo Utang Bunga	<u>26.303.978</u>	<u>31.691.039</u>

3.10 Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PPh Pasal 29	-	19.562.852
Saldo Utang Pajak	<u>-</u>	<u>19.562.852</u>

3.11 Simpanan

Simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Tabungan		
- Tabungan Umum	6.068.797.166	7.057.660.020
- Tabungan SIMPEL	114.206.891	47.499.710
Jumlah Simpanan Tabungan	<u>6.183.004.057</u>	<u>7.105.159.730</u>
- Deposito Berjangka		
- 3 Bulan	100.000.000	2.233.000.000
- 6 Bulan	2.652.000.000	1.002.500.000
- 12 Bulan	7.051.800.000	7.293.800.000
Jumlah Simpanan Deposito Berjangka	<u>9.803.800.000</u>	<u>10.529.300.000</u>
Saldo Simpanan	<u>15.986.804.057</u>	<u>17.634.459.730</u>

Tabungan berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:

- Tabungan -Terkait	658.080.812	697.905.463
- Tabungan - Tidak Terkait	5.524.923.245	6.407.254.267
Saldo Tabungan	<u>6.183.004.057</u>	<u>7.105.159.730</u>

Informasi simpanan tabungan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Keterangan	Keterkaitan	Nominal
1	2.02.01.0001	Drs Sunardi	Komut dan Pemegang Sahar	79.564.548
2	2.02.01.0002	Hardjono	Pemegang Saham	7.107.657
3	2.02.01.0004	Fitri Rahayu, SE	Komisaris dan Pemegang Sa	166.247.964
4	2.02.01.0939	Rosa Ardianingrum	Anak Komisaris & Pemeg. S	1.217.286
5	2.02.01.2646	Erri Herwanto	Adik Komisaris & Pemeg. S	72.718.194
6	2.02.01.2676	Ardian Widyatmoko	Anak Komisaris & Pemeg. S	9.128.661
7	2.02.01.2934	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	91.223.687
8	2.02.01.2934-01	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	8.727.918
9	2.02.01.2944	Abdullah Sjukur	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	243.315
19	2.02.01.3042	Tri Waluyo Indra Sanyoto	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	20.971.035
11	2.02.01.3572	Danang Bujono	PE Pemasaran	179.874
12	2.02.01.4222-00	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	145.413.816
13	2.02.01.5173-00	Suyanto	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	55.336.857
			Jumlah	658.080.812

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.11 Simpanan ~ lanjutan

Tingkat Suku Bunga Tabungan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 153/SK-DIR/WAU/X/2024 Tentang Tabungan Umum tertanggal 22 Oktober 2024, Suku bunga 3 % per tahun dihitung berdasarkan saldo harian.

	2024	2023
Deposito Berjangka berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:		
- Deposito Berjangka - Terkait	2.114.500.000	2.194.500.000
- Deposito Berjangka - Tidak Terkait	7.689.300.000	8.334.800.000
Saldo Deposito Berjangka	9.803.800.000	10.529.300.000

3.11 Simpanan

Informasi simpanan deposito kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Keterkaitan	Nominal
1	2.02.02.0002	Hardjono	Pemegang Saham	2.000.000
2	2.02.02.0002-01	Hardjono	Pemegang Saham	20.000.000
3	2.02.02.0002-03	Hardjono	Pemegang Saham	100.000.000
4	2.02.02.0004-02	Fitri Rahayu SE	Komisaris & Pemeg. Saham	10.000.000
5	2.02.02.0004-03	Fitri Rahayu SE	Komisaris & Pemeg. Saham	40.000.000
6	2.02.02.0004-04	Fitri Rahayu SE	Komisaris & Pemeg. Saham	50.000.000
6	2.02.02.0630	Sri Suryani	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	7.500.000
7	2.02.02.0630-01	Sri Suryani	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	60.000.000
8	2.02.02.2646	Erri Herwanto	Adik Kom. & Pemeg. Shm	20.000.000
9	2.02.02.2862	Nanik Hartati	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	100.000.000
10	2.02.02.2894	Anisah Susetyowati	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	40.000.000
11	2.02.02.2894-01	Anisah Susetyowati	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	30.000.000
12	2.02.02.2894-02	Anisah Susetyowati	Sdr Komisaris & Pemeg. Sh	100.000.000
13	2.02.02.2934	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	35.000.000
14	2.02.02.2934-01	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	25.000.000
15	2.02.02.2934-02	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	12.500.000
16	2.02.02.2934-03	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	20.000.000
17	2.02.02.2934-04	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	20.000.000
18	2.02.02.2934-05	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	12.500.000
19	2.02.02.2934-06	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	100.000.000
20	2.02.02.2934-07	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	50.000.000
21	2.02.02.2934-08	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	75.000.000
22	2.02.02.2934-09	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	50.000.000
23	2.02.02.2934-10	Oktavia Kariola Sumartha Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	20.000.000
22	2.02.02.3042-01	Tri Waluyo Indra Sanyoto	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	100.000.000
23	2.02.02.3042-02	Tri Waluyo Indra Sanyoto	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	100.000.000
24	2.02.02.3042-03	Tri Waluyo Indra Sanyoto	Sdr. Komisaris & Pemeg. Sh	100.000.000
25	2.02.02.4222-00	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	50.000.000
26	2.02.02.4222-01	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	12.500.000
27	2.02.02.4222-02	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	12.500.000
28	2.02.02.4222-03	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	10.000.000
29	2.02.02.4222-04	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	100.000.000
30	2.02.02.4222-05	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	145.000.000
	<i>Saldo dipindahkan</i>			<i>1.629.500.000</i>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.11 Simpanan ~ lanjutan

Informasi simpanan deposito kepada pihak terkait adalah sebagai berikut ~ *Lanjutan* :

No	No Rekening	Nama	Keterkaitan	Nominal
	<i>Saldo pindahan</i>			1.629.500.000
31	2.02.02.4222-06	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	50.000.000
32	2.02.02.4222-07	Mutiara Maharani Sumarta Putri	Anak Komisaris & Pemeg. S	85.000.000
33	2.02.02.5173-01	Suyanto	Sdr. Komisaris & Pemeg. S	100.000.000
34	2.02.02.5173-02	Suyanto	Sdr. Komisaris & Pemeg. S	150.000.000
35	2.02.02.5173-03	Suyanto	Sdr. Komisaris & Pemeg. S	100.000.000
			Jumlah	2.114.500.000

Tingkat Suku Bunga Deposito

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 154/SK-DIR/WAUX/2024 Tentang Deposito tertanggal 23 Oktober 2024, Suku bunga deposito adalah sebagai berikut:

No	Jangka Waktu	Suku Bunga
1	Jangka Waktu 6 Bulan	2% dibawah LPS
2	Jangka Waktu 12 Bulan	1% dibawah LPS

3.12 Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan Dari Bank Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Simpanan Dari Bank Lain :		
- Deposito PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No 00580	2.000.000.000	2.000.000.000
- Deposito PT BPR Jadi Manunggal	-	300.000.000
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.300.000.000</u>

Suku bunga untuk ABP ditetapkan sebesar tarif LPS saat itu.

3.13 Pinjaman Diterima

Pinjaman Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pinjaman Diterima:		
- Pinjaman Diterima Bank Jateng 2019 I	-	122.582.710
- Pinjaman Diterima Bank Jateng 2022 I	-	666.666.000
- Pinjaman Diterima Bank Jateng 2022 II	-	683.332.700
Saldo Pinjaman Diterima	<u>-</u>	<u>1.472.581.410</u>

Perjanjian Pinjaman Diterima

PT. BANK JATENG (JAWA TENGAH) Tbk.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit a/n PT BPR Wuni Artha Utama Nomor 0864/KRD 02.01/009/2018 tertanggal 04 September 2018. Dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit tersebut menerangkan pihak PT. Bank Jateng telah melakukan pemberian kredit kepada PT BPR Wuni Artha Utama, terinci sebagai berikut:

- 1 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- 2 Sifat Kredit : *Aplofend*
- 3 Limit Kredit : Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)
- 4 Penggunaan : Tambahan Modal Kerja yang Diteruspinjamkan ke *end Users*
- 5 Jangka Waktu : Maksimal 72 bulan termasuk masa penarikan selama 12 bulan dengan ketentuan jangka waktu kredit ke *end user* (anggota) maksimal 60 bulan.
- 6 Suku Bunga : 9,5% per tahun *floating rate*, *reviewable* setiap terjadi perubahan suku bunga Peninjauan kembali suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.13 Pinjaman Diterima - Lanjutan

Perjanjian Pinjaman Diterima - Lanjutan

PT. BANK JATENG (JAWA TENGAH) Tbk.	
7	<p>Periode Bunga :</p> <p>- Seluruh bunga yang timbul selama periode bunga wajib dibayar 1 bulanan dan tidak lewat dari jatuh tempo fasilitas, bunga akan dibayarkan dibelakang dan dihitung dengan dasar perhitungan aktual dengan ketentuan 1 tahun sama dengan 360 hari, dimana perhitungan bunga dihitung secara harian dari saldo debit yang telah ditarik.</p> <p>- Pendebetan bunga dari rekening dibebankan pada setiap tanggal perjanjian kredit.</p>
8	Provisi : 0,5% dari Rp4.000.000.000,- dibayar proporsional setiap penarikan Effektif
9	Sistem Angsuran : Pokok dan bunga dibayar setiap bulan
10	Perjanjian Kredit : Notariil
11	<p>Biaya yang timbul</p> <p style="padding-left: 20px;">Biaya administrasi : sebesar Rp1.000.000,- yang dibayar sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> <p style="padding-left: 20px;">Biaya-biaya lainnya : debitur wajib membayar seluruh biaya-biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya biaya notaris dan biaya peninjauan.</p>
12	<p>Jenis Pengikatan dan Jaminan <u>Jenis Jaminan</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Jaminan Utama Tagihan Piutang Lancar berupa kredit yang disalurkan kepada Debitur PT BPR Wuni Artha Utama minimal senilai 100% dari plafond kredit dan tidak dijaminan pada Bank Lain atau lembaga keuangan non Bank.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Jaminan Tambahan</p> <p style="padding-left: 40px;">- <i>Cash Collateral</i> sebesar 5% dari plafond kredit berupa giro atau tabungan dan pemenuhannya proporsional per penarikan fasilitas kredit.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Surat Aksep sebagai jaminan kesanggupan pembayaran kredit sampai dengan pinjaman lunas yang ditandatangani oleh Pengurus/Direksi.</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>Pengikatan dan Nilai Pengikatan Jaminan Kredit</u></p> <p style="padding-left: 40px;">- Pengikatan secara fidusia notariil untuk jaminan piutang lancar dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari <i>outstanding</i> kredit.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Pengikatan secara gadai dibawah tangan untuk jaminan <i>cash collateral</i>.</p>

PT. BANK JATENG (JAWA TENGAH) Tbk.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit a/n PT BPR Wuni Artha Utama Nomor 77/AKR.02/009/2021 tertanggal 01 Desember 2021. Dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit tersebut menerangkan pihak PT. Bank Jateng telah melakukan pemberian kredit kepada PT BPR Wuni Artha Utama, terinci sebagai berikut:

1	Jenis Kredit : Kredit kepada BPR
2	Sifat Kredit : Berjangka <i>Aplofend</i>
3	Facility/Loan Type : KBP/KR040
4	Limit Kredit : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
5	Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja yang Diteruspinjamkan ke <i>end Users</i>
6	<p>Jangka Waktu :</p> <p>- Maksimal 66 bulan termasuk masa penarikan selama 6 bulan</p> <p>- Masa pembayaran kembali maksimal 60 bulan dihitung sejak penarikan kredit.</p>
7	<p>Suku Bunga : suku bunga ditetapkan sebesar 9,25% <i>p.a effective (reviewable)</i> dan apabila terjadi perubahan suku bunga, bank akan menyampaikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya kepada Debitur.</p>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.13 Pinjaman Diterima - Lanjutan

Perjanjian Pinjaman Diterima - Lanjutan

PT. BANK JATENG (JAWA TENGAH) Tbk.

- 8 Perhitungan bunga :
- Seluruh bunga yang timbul selama periode bunga wajib dibayar 1 bulanan dan tidak lewat dari jatuh tempo fasilitas, bunga akan dibayarkan dibelakang dan dihitung dengan dasar perhitungan aktual dengan ketentuan 1 tahun sama dengan 360 hari, dimana perhitungan bunga dihitung secara harian dari saldo debit yang telah ditarik.
 - Pendebetan bunga dari rekening dibebankan pada setiap tanggal perjanjian kredit.
- 9 Provisi : 0,5% dari plafond kredit dibayarkan proporsional per penarikan fasilitas kredit.
- 10 Sistem Angsuran : Pokok dan bunga dibayar setiap bulan
- 11 Perjanjian Kredit : Notariil
- 12 Biaya yang timbul
- Biaya administrasi : sebesar Rp2.000.000,- yang dibayar sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - Biaya-biaya lainnya : debitor wajib membayar seluruh biaya-biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris.
- 13 Jenis Pengikatan dan Jaminan Jenis Jaminan
- a. Jaminan Utama
Tagihan Piutang Lancar berupa kredit yang disalurkan kepada Debitur PT BPR Wuni Artha Utama minimal senilai 100% dari plafond kredit dan tidak dijamin pada Bank Lain atau lembaga keuangan non Bank.
 - b. Jaminan Tambahan
 - *Cash Collateral* sebesar 5% dari plafond kredit berupa giro atau tabungan dan pemenuhannya proporsional per penarikan fasilitas kredit.
 - Surat Aksep sebagai jaminan kesanggupan pembayaran kredit sampai dengan pinjaman lunas yang ditandatangani oleh Direksi.
- Pengikatan dan Nilai Pengikatan Jaminan Kredit
- Pengikatan secara fidusia notariil untuk jaminan piutang lancar dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari *outstanding* kredit.
 - Pengikatan secara gadai dibawah tangan untuk jaminan *cash collateral*.

3.14 Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Kewajiban Imbalan Kerja		
- Kewajiban Imbalan Kerja	96.597.855	324.686.411
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	96.597.855	324.686.411

Catatan

Kewajiban Imbalan Pasca kerja (DPLK) sesuai dengan SK Direksi No. 147/SK-DIR/WAU/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang berisi tentang jumlah iuran dan persyaratan lainnya.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.15 Kewajiban Lain-lain

Saldo Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kewajiban Lain-lain		
- Cadangan Biaya Pendidikan	102.206.129	97.243.421
- Cadangan Dana Sosial	22.565.697	25.298.263
- Cadangan PPh 21	-	34.165.500
- Cadangan Biaya Seragam	4.734.425	969.425
- Cadangan Biaya KAP	7.469.369	6.250.000
- Cadangan Biaya Pemeliharaan System	9.000.000	-
- Cadangan CSR	28.749.357	21.733.574
- Titipan Notaris biaya APHT	29.636.949	51.103.009
- Cadangan Bingkisan Hari Raya Keagamaan	6.750.000	-
- Cadangan Penerimaan OJK	3.385.163	-
Saldo Kewajiban Lain-Lain	<u>214.497.089,00</u>	<u>236.763.192</u>

3.16 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
- Modal yang belum disetor	(700.000.000)	(2.000.000.000)
- Modal disetor	9.300.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba		
- Cadangan Umum	1.670.935.130	1.468.129.462
- Laba Belum Ditentukan Tujuannya:		
- Laba/Rugi Tahun Lalu	-	557.681.532
- Laba/Rugi Tahun Berjalan	286.163.889	1.014.028.340
Saldo Ekuitas	<u>11.257.099.019</u>	<u>11.039.839.334</u>

Catatan)*

Pembagian laba ditahan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 12 Februari 2024.

3.17 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga periode Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan bunga penempatan pada bank lain:		
- Pendapatan Bunga Giro Bank Lain		
- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	-	11.789
- PT Bank Mandiri	-	132.887
- PT Bank Jateng	-	468.104
- Pendapatan Bunga Tabungan Bank Lain		
- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	-	1.446.792
- PT Bank Mandiri	15.268.767	15.943.334
- PT Bank BJB	17.254.181	17.527.395
- PT Bank Jateng	1.818.935	2.832.565
- PT Bank Muamalat	41.781.601	182.452
	<u>76.123.484</u>	<u>38.545.318</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.17 Pendapatan Bunga - Lanjutan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Pendapatan Bunga Deposito Bank Lain		
- PT BPR Kedung Arto	26.698.246	-
- PT Bank Jateng	1.292.705	1.313.591
- PT BPR Bank Ceper	65.193.579	4.218.750
- PT BPR Bakti Riyadi	-	11.371.548
Jumlah	<u>93.184.530</u>	<u>16.903.889</u>
Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan:		
- Kredit Yang Diberikan		-
- Bunga Pokok Kredit Umum	2.655.841.219	3.813.575.054
- Bunga Pokok Kredit Pensiun	3.774.348	8.766.291
- Bunga Pokok Kredit Karyawan Umum	54.030.450	70.796.751
- Bunga Pokok Kredit Deposito PNM	2.772.000	2.917.123
- Bunga Pokok Kredit Restruk Covid 19	-	10.476.677
Jumlah	<u>2.716.418.017</u>	<u>3.906.531.896</u>
Jumlah Pendapatan Bunga	<u>2.809.602.547</u>	<u>3.961.981.103</u>

Pendapatan Provisi dan Administrasi adalah berikut ini:

- Pendapatan Provisi dan Administrasi Kredit		
- Pendapatan Provisi Dan Komisi Kredit		
- Provisi Kredit Umum	109.140.019	209.474.965
- Provisi Kredit Pensiun	93.750	150.200
- Provisi Kredit Karyawan Umum	2.338.257	4.202.824
- Provisi Kredit Deposito PNM	78.756	78.756
Jumlah Pendapatan Provisi Dan Administrasi Kredit	<u>111.650.782</u>	<u>213.906.745</u>

3.18 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah berikut ini:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Penerimaan Kredit Yang Di Hapus Buku	1.100.000	12.151.200
- Pendapatan Pemulihan PPAP		-
- Pemulihan PPAP ABA	912	4.377.333
- Pemulihan PPAP Kredit	159.584.765	111.190.886
- Lainnya		
- Pendapatan Administrasi Kredit Lainnya	229.995.633	308.606.641
- Pendapatan Denda Kredit	122.182.060	224.880.020
- Pendapatan Administrasi Tabungan/Tutup Tabungan	29.504.679	33.970.014
- Pendapatan Pinalti Deposito	6.840.000	210.000
- Pendapatan Lainnya (Realisasi Kredit)	38.862.923	56.192.650
- Pendapatan pembulatan	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>588.070.972</u>	<u>751.578.744</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.19 Beban Bunga

Beban bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terinci berikut ini:

	2024	2023
- Beban Bunga Kontraktual		
- Beban Bunga Deposito Berjangka		-
Beban Bunga Deposito Berjangka 3 bulan	48.903.175	157.939.659
Beban Bunga Deposito Berjangka 6 bulan	143.278.396	78.385.353
Beban Bunga Deposito Berjangka 12 bulan	456.066.100	353.320.187
- Beban Bunga Tabungan		-
Beban Bunga Tabungan Umum	239.433.786	238.030.721
Beban Bunga Tabungan SIMPEL	1.405.100	906.239
- Beban Bunga Simpanan Dari Bank Lain		
Beban Bunga Deposito	143.671.269	248.414.539
- Beban Bunga Pinjaman yang Diterima		
Beban Bunga Dari Bank Lain	46.285.060	175.769.828
Lainnya	40.410.390	38.592.417
- Biaya Transaksi Kepada Bank Lain	11.945.835	7.958.354
Jumlah Beban Bunga	1.131.399.111	1.299.317.297

3.20 Beban Penyisihan Kerugian

Beban penyisihan kerugian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah berikut ini:

	2024	2023
- Beban Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan	83.041.128	151.557.593
- Beban Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain	-	4.378.245
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	83.041.128	155.935.838

3.21 Beban Pemasaran

Beban pemasaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah berikut ini:

	2024	2023
- Beban Pemasaran	33.274.000	21.046.100
Jumlah Beban Pemasaran	33.274.000	21.046.100

3.22 Beban Administrasi Umum

Beban Administrasi Umum, utk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terinci berikut ini :

	2024	2023
- Beban Tenaga Kerja		
- Gaji Pokok	878.182.716	892.123.250
- Tunjangan-Tunjangan		
Tunjangan Hari Raya (THR)	129.008.831	98.428.098
DPLK	48.750.000	33.000.000
PPh 21 Pengurus	20.144.850	-
Honor Tenaga Kontrak	13.200.000	6.000.000
Honor Lainnya (Satpam - Jaga Malam)	54.460.912	52.635.912
Uang Kehadiran Karyawan	20.680.000	-
- Honorarium	296.636.200	347.579.200
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>1.461.063.509</i>	<i>1.429.766.460</i>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.22 Beban Administrasi Umum- Lanjutan

- Beban Tenaga Kerja - <i>Lanjutan</i>		
<i>Jumlah pindahan</i>	<u>1.461.063.509</u>	<u>1.429.766.460</u>
- Lainnya		
Uang Lembur	27.290.113	30.592.748
Pakaian Dinas	8.250.000	-
Insentif Marketing	73.469.431	122.369.014
Lainnya	29.626.751	225.215.400
Sewa Kendaraan Marketing	<u>317.000</u>	
Sub Jumlah Beban Tenaga Kerja	1.600.016.804	1.807.943.622
- Beban Pendidikan		
- Beban Pendidikan	<u>54.238.308</u>	<u>80.960.184</u>
Sub Jumlah Beban Pendidikan	54.238.308	80.960.184
- Beban Sewa		
- Beban Sewa Gedung Kantor / Pos Pelayanan	45.000.000	45.000.000
- Beban Sewa Kendaraan	-	535.000
- Beban Sewa Lainnya	<u>5.414.600</u>	<u>5.626.100</u>
Sub Jumlah Beban Sewa	50.414.600	51.161.100
- Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		
- Beban Penyusutan Aset Tetap		-
- Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan	21.461.230	22.204.349
- Beban Penyusutan Kendaraan	63.085.845	61.941.661
Sub Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	84.547.075	84.146.010
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>10.325.004</u>	<u>10.325.004</u>
Sub Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10.325.004	10.325.004
- Beban Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Lainnya	<u>8.804.254</u>	<u>15.326.318</u>
Sub Jumlah Beban Premi Asuransi	8.804.254	15.326.318
- Beban pemeliharaan dan perbaikan kantor		
- Perawatan Inventaris	2.192.500	10.790.000
- Perawatan Kendaraan	12.484.629	16.158.838
- Perawatan Lainnya	<u>28.200.000</u>	<u>10.910.200</u>
Sub Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	42.877.129	37.859.038
- Pajak-Pajak non PPh		
- Pajak Kendaraan Bermotor	6.944.500	6.215.000
- Pajak Lainnya	<u>1.190.582</u>	<u>75.000</u>
Sub Jumlah Beban Pajak Non Pph	8.135.082	6.290.000
- Beban Barang dan Jasa		
- Alat Tulis dan Kantor (ATK)	13.865.000	14.768.900
- Bahan Bakar	<u>35.162.073</u>	<u>46.770.485</u>
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<u>49.027.073</u>	<u>61.539.385</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.22 Beban Administrasi Umum- Lanjutan

- Beban Barang dan Jasa - Lanjutan		
<i>Jumlah pindahan</i>	<u>49.027.073</u>	<u>61.539.385</u>
- Telepon	7.334.807	7.336.312
- Listrik	14.587.750	15.192.500
- Rumah Tangga	5.395.700	4.653.815
- Materai	1.010.000	1.283.500
- Biaya Jamuan	2.133.200	4.198.500
- Uang Kehadiran	-	29.670.000
- Lainnya	38.882.723	65.257.489
Sub Jumlah Beban Barang dan Jasa	<u>118.371.253</u>	<u>189.131.501</u>
Jumlah Beban Administrasi Umum	<u>1.977.729.509</u>	<u>2.283.142.777</u>

3.23 Beban Operasional Lainnya.

Beban operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Operasional Lainnya.		
- Administrasi Bank	607.800	1.246.000
- Fee	15.271.572	15.078.880
- Pungutan OJK	19.065.476	15.511.920
Jumlah Beban Operasional Lainnya.	<u>44.544.848</u>	<u>31.836.800</u>

3.24 Pendapatan (Beban) Non Operasional

Pendapatan (Beban) non operasional untuk periode yg berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Non Operasional		
- Pendapatan Keuntungan Penjualan Aset	-	475.000
- Pendapatan Non Operasional lainnya	11.733.272	11.273.747
- Pendapatan Ganti Rugi asuransi	-	8.993.700
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	<u>11.733.272</u>	<u>20.742.447</u>
Beban Non Operasional		
- Biaya Non Operasional Lainnya	5.660.000	13.339.035
Jumlah Beban Non Operasional	<u>5.660.000</u>	<u>13.339.035</u>
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	<u>6.073.272</u>	<u>7.403.412</u>

3.25 Taksiran Pajak Penghasilan Badan

Jumlah taksiran pajak penghasilan yang dibentuk oleh BPR untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>35.368.572</u>	<u>129.562.852</u>
Laba Sebelum Pajak	<u>321.532.461</u>	<u>1.143.591.192</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.25 Taksiran Pajak Penghasilan Badan ~ Lanjutan

	2024	2023
Peredaran Bruto :		
- Pendapatan Bunga	2.885.726.031	3.961.981.103
- Pendapatan Provisi dan Administrasi	111.650.782	213.906.745
- Pendapatan Operasional Lainnya	588.070.972	751.578.744
- Pendapatan Non Operasional	11.733.272	20.742.447
Jumlah Peredaran Bruto	3.597.181.057	4.948.209.039
Laba Fiskal	321.532.461	1.143.591.192
Beban Pajak Penghasilan		
Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas (4.800.000.000/Peredaran Bruto) X Laba Fiskal	321.532.461	1.109.338.283
Penghasilan Kena Pajak tidak yang memperoleh fasilitas	-	34.252.908
Laba Yang Dikenakan tarif 50% x 22% x Penghasilan Kena Pajak	35.368.571	122.027.211
Laba Yang Dikenakan tarif 100% x 22% x Penghasilan Kena Pajak	-	7.535.640
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	35.368.571	129.562.851
Taksiran Pajak Yang dibentuk BPR	35.368.572	129.562.852
Selisih	(1)	1
<u>Masa Pajak PPh 25</u>	2024	2023
Januari	1.647.426	10.000.000
Februari	7.789.109	10.000.000
Maret	8.634.481	10.000.000
April	-	10.000.000
Mei	1.408.311	10.000.000
Juni	4.417.857	10.000.000
Juli	-	10.000.000
Agustus	3.527.717	10.000.000
September	2.172.772	10.000.000
Oktober	5.154.527	10.000.000
Nopember	3.208.134	10.000.000
Jumlah SSP PPh 25 Januari s/d November	37.960.334	110.000.000
Pajak Lebih (Kurang) Bayar	2.591.762	(19.562.851)
PPh 25 Bulan Desember yang dibayarkan bulan Januari	-	19.562.852
PPh Lebih (Kurang) Bayar PPh 29	2.591.762	(1)

3.26 Rekening Administratif

Rekening Administratif per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Tagihan Komitmen		
Kewajiban	-	-
Jumlah Komitmen	-	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.26 Rekening Administratif - Lanjutan

	2024	2023
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
- Bunga Kredit yang Diberikan	517.506.427	213.235.000
Aktiva Produktif yang Dihapusbukukan		
- Kredit yang Diberikan	67.215.500	68.315.500
- Penempatan pada Bank Lain		
- Pendapatan Bunga Atas Kredit Yang Dihapusbukukan	84.811.850	88.891.850
Jumlah Kontinjensi	669.533.777	370.442.350

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Pendirian Perusahaan

PT. BPR Wuni Artha Utama didirikan pada tanggal 09 Februari 2006 berdasarkan akta pendirian No. 05 yang dibuat oleh Notaris Klaten, saudari Primastuti Rahayuningsih, Sarjana Hukum dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07659HT.01.01 Tahun 2006, tanggal 16 Juni 2006 yang ditetapkan di Klaten.

b. Tempat dan Kedudukan

PT BPR Wuni Artha Utama beralamat di Jl. Raya Klaten - Solo Km.08, Meger, Ceper, Klaten

Telp./Fax : (0272) 331032

Email : wuniarthautama@yahoo.co.id

c. Jangka Waktu Pendirian

PT BPR Wuni Artha Utama didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

d. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 19 Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 31 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Septi Hariyanti, SE., Mkn., notaris di Kabupaten Klaten serta telah disahkan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0008987.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 07 Februari 2022 yang berisi merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

e. Perizinan Usaha

Dalam melaksanakan operasi usahanya, PT BPR Wuni Artha Utama memiliki perizinan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07659HT.01.01 Tahun 2006 tertanggal 15 Maret 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. BPR Wuni Artha Utama.
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 8/73/KEP.GBI/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 06 Oktober 2006

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - Lanjutan

e. Perizinan Usaha - Lanjutan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No: 02.513.901.5-525.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, tanggal terdaftar 28 Februari 2006.
4. Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 503.1/162/2013 yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.12.1.64.00318 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Klaten tertanggal 19 Februari 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2023.
6. Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/92/VI/2009 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Kecamatan Ceper Desa Meger.

f. Modal

Berdasarkan akta pendirian No. 05 yang dibuat oleh Notaris Klaten, saudara Primastuti Rahayuningsih, Sarjana Hukum, dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07659.HT.01.01.Tahun 2006, tanggal 15 Maret 2006 yang ditetapkan di Klaten, dinyatakan bahwa modal dasar PT. BPR Wuni Artha Utama berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham. Masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	400	1,000,000	400,000,000	40%
Tuan Drs. Harjono	400	1,000,000	400,000,000	40%
Nyonya Fitri Rahayu	150	1,000,000	150,000,000	15%
Tuan Drs. Martono	50	1,000,000	50,000,000	5%
Jumlah	1,000		1,000,000,000	100%

Seiring dengan perkembangan perusahaan, telah terjadi perubahan komposisi permodalan, perubahan terakhir dicatatkan pada Notaris TH Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH., M. Kn, dengan Akta Nomor : 24 Tanggal 29 September 2021. Dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa terjadi penambahan modal disetor sehingga menjadi Rp 7.525.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 7.525 (tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan susunan kepemilikan sebagai berikut :

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	3,450	1,000,000	3,450,000,000	46%
Nyonya Fitri Rahayu	3,125	1,000,000	3,125,000,000	42%
Tuan Drs. Hardjono	950	1,000,000	950,000,000	13%
Jumlah	7,525		7,525,000,000	100%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - Lanjutan

f. Modal - Lanjutan

Pada tahun 2022 terdapat penambahan modal disetor PT BPR Wuni Artha Utama. Hal ini berdasarkan Akta No. 09 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Septi Hariyanti, SE., Mkn., notaris di Kabupaten Klaten. Serta telah disahkan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0169271 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 15 Maret 2022 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-273/KO.0301/2022 Hal: Penambahan Modal Disetor PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 1 April 2022

Dalam hal ini berisi salah satunya memutuskan dan menyetujui penambahan modal disetor PT BPR Wuni Artha dengan penambahan sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang semula berjumlah 7.525 (tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 7.525.000.000,- (tujuh milyar lima dua puluh lima juta rupiah) sehingga bertambah menjadi 8.000 (delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga kepemilikan saham PT BPR Wuni Artha per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	3,700	1,000,000	3,700,000,000	46%
Nyonya Fitri Rahayu, SE	3,350	1,000,000	3,350,000,000	42%
Tuan Drs. Hardjono	950	1,000,000	950,000,000	12%
Jumlah	8,000		8,000,000,000	100%

Pada tahun 2023 struktur kepemilikan saham belum mengalami perubahan. Hal ini tercatat dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018570. AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023. Kepemilikan tersebut juga telah disahkan melalui akta notaris yang terbaru di hadapan notaris TH. Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Klaten dengan akta nomor 09 tertanggal 13 Maret 2023 masih dengan kepemilikan yang sama.

Berdasarkan akta notaris no 28 tertanggal 28 Februari 2024 dihadapan notaris TH Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH, PT BPR Wuni Artha Utama mengalami perubahan kepemilikan modal yang telah disetor sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau bertambah menjadi 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah). Kepemilikan tersebut juga telah tercatat dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015852.AH.01.02 Tahun 2024.Perihal: Persetujuan Peubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 12 Maret 2024 Adapun kepemilikan saham pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - Lanjutan

f. Modal - Lanjutan

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	4,325	1,000,000	4,325,000,000	47%
Nyonya Fitri Rahayu, SE	3,925	1,000,000	3,925,000,000	42%
Tuan Drs. Hardjono	1,050	1,000,000	1,050,000,000	11%
Jumlah	9,300		9,300,000,000	100%

g. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PT BPR Wuni Artha Utama tahun 2024 berdasarkan Akta No. 3 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 09 Agustus 2024 dihadapan notaris TH. Retno Triwiyati Sapar Wulan, S.H., M.Kn notaris di Klaten . Adapun susunan pengurus PT BPR Wuni Artha Utama per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus :

- Komisaris Utama : Tuan Drs. Sunardi
- Komisaris : Nyonya Fitri Rahayu, SE
- Direktur : Tuan Febry Nurcahyo Alfath, SE
- Direktur YMF Kepatuhan : -

Sampai tanggal 31 Desember 2024, PT BPR Wuni Artha Utama memiliki karyawan berjumlah 22 orang sudah termasuk 1 orang Direksi.

h. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca.

I. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 05 Maret 2025.

LAMPIRAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
KUALITAS ASET PRODUKTIF

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Kredit	Penempatan pd Bank Lain	Jumlah 2024
1. ASET PRODUKTIF			
- Lancar	10,080,444,444	7,005,925,566	17,086,370,010
- Dalam Perhatian Khusus	6,711,746,715	-	6,711,746,715
- Kurang lancar	1,080,959,027	-	1,080,959,027
- Diragukan	1,192,016,841	-	1,192,016,841
- Macet	2,989,023,967	-	2,989,023,967
JUMLAH	22,054,190,994	7,005,925,566	29,060,116,560
2. ASET PRODUKTIF YANG DIKUALIFIKASIKAN			
- Kurang lancar (50%)	540,479,514	-	540,479,514
- Diragukan (75%)	894,012,631	-	894,012,631
- Macet (100%)	2,989,023,967	-	2,989,023,967
JUMLAH	4,423,516,111		4,423,516,111
3. AGUNAN YANG DIPERHITUNGAN			
- Lancar	-	-	-
- Dalam Perhatian Khusus	5,776,663,645	-	5,776,663,645
- Kurang lancar	994,195,635	-	994,195,635
- Diragukan	1,171,602,141	-	1,171,602,141
- Macet	2,951,812,467	-	2,951,812,467
JUMLAH	10,894,273,888		10,894,273,888
4. PPAPWD (setelah diperhitungkan agunan)			
- Lancar (0,5%)	50,402,222	-	50,402,222
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	28,052,492	-	28,052,492
- Kurang lancar (10%)	8,676,339	-	8,676,339
- Diragukan (50%)	10,207,350	-	10,207,350
- Macet (100%)	37,211,500	-	37,211,500
JUMLAH	134,549,904	-	134,549,904
PPAP yang wajib dibentuk bank			134,549,904
PPAP yang dibentuk bank			134,549,914
Selisih (kurang) lebih bentuk PPAP			10
RASIO - RASIO	Aset Produktif Yang Diklasifikasikan		15.22%
	Aset Produktif		
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		100.00%
	PPAP yang wajib dibentuk		
	NPL Bruto		5,261,999,835
	Rasio NPL Bruto		23.86%
	NPL Netto		5,205,904,646
	Rasio NPL Netto		23.61%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Komponen	Nominal	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RESIKO (%)	JUMLAH ATMR 2024
1	Kas	208,641,350			0%	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-			0%	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	-	-	-	0%	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.				0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.		-	-	15%	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	7,005,925,566	-	7,005,925,566	20%	1,401,185,113
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah		-	-	20%	-
	a. Kredit kepada bank lain		-	-		-
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah		-	-		-
	c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain		-	-		-
	d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah		-	-		-
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit		-	-	20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	13,880,048,399	-	13,880,048,399	30%	4,164,014,520
10	Kredit kepada BUMN/BUMD		-	-	50%	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Komponen	Nominal	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RESIKO (%)	JUMLAH ATMR 2024
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)		-	-	50%	-
12	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan.		-	-	50%	-
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	2,540,404,375	-	2,540,404,375	50%	1,270,202,188
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	-	-	-	70%	-
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2,261,704,480	-	2,261,704,480	70%	1,583,193,136
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	273,009,773	-	273,009,773	100%	273,009,773
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	3,099,023,967	-	3,099,023,967	100%	3,099,023,967
	a.Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	1,328,165,000	-	1,328,165,000		
	b.Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	1,770,858,967	-	1,770,858,967		
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	162,342,838			100%	162,342,838
19	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	160,000,000			100%	160,000,000
20	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19	265,615,479			100%	265,615,479
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum	29,856,716,227				12,378,587,013

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2023
I MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1. Modal Disetor	9,300,000,000	100%	9,300,000,000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100%	
1.1.2.2 Modal Sumbangan	-	100%	
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	100%	
1.1.2.4 Cadangan Umum	1,670,935,130	100%	1,670,935,130
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	-	100%	
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	-	100%	-
1.1.2.7 Laba Tahun Berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	286,163,889	Paling tinggi 50% apabila Laba atau 100%apabila Rugi	143,081,945
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan			
1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-			
1.1.2.8 Pajak Tangguhan -/-	-	100%	
1.1.2.9 Goodwill -/-	-	100%	
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 sd 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	50%	
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 sd 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	75%	

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2023
<i>Lanjutan</i>			
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	50%	
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	
Sub Total Cadangan Tambahan Modal	1,957,099,019		1,814,017,075
Jumlah Modal Inti Utama	11,257,099,019		11,114,017,075
I.2 Modal Inti Tambahan	-	100%	
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)			11,114,017,075
II. MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu	-	Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap	-	100%	
II.3 PPAP umum	50,402,222	Paling tinggi 1,25% dari ATMR	50,402,222
II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)		Paling tinggi 100% dari modal inti	11,164,419,297
III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)			11,164,419,297

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2023
<i>Lanjutan</i> Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			12,378,587,013
Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap (-)			
ATMR			
Rasio KPMM = Jumlah Modal / ATMR			90.19%
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)			1,485,430,442
Rasio modal inti (%) = Jumlah modal inti / ATMR			89.78%
Jumlah minimum modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)			990,286,961

BMPK:

Pihak Terkait (10% * Modal)

1,116,441,930

Pihak Tidak Terkait (20% * Modal)

2,232,883,859

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
RASIO KREDIT TERHADAP DANA DITERIMA
Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN		SALDO
1	Simpanan Pihak ke 3	
	a Tabungan	6,183,004,057
	b Simpanan Berjangka (Deposito)	9,803,800,000
2	Pinjaman diterima bukan dari Bank > 3 bln	-
3	Deposito dan Pinjaman diterima dari bank lebih dari 3 bln	-
4	Modal Pinjaman	-
5	Modal Inti	-
	Jumlah Dana yang Diterima	15,986,804,057.00
6	Aset Produktif (selain ABA)	
	a Kredit yang Diberikan	21,934,601,393
	b Kredit yang Diberikan kepada Bank Lain	-
	c Lainnya	-
	Jumlah Aset Produktif	21,934,601,393.00
LDR (Aset Produktif / Dana yang Diterima)		137.20%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LIKUIDITAS (CASH RATIO)

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	SALDO
1. Alat Likuid	
a. Kas	208,641,350
b. Antar Bank Aktiva	
- Giro	210,340,891
- Tabungan	5,265,584,675
- dikurangi Tabungan ABP	-
Selisih Tabungan antar bank	-
Jumlah Alat Likuid	5,684,566,916
2. Utang Lancar	
a. Kewajiban Segera	21,274,714
b. Simpanan Pihak ke 3	
- Tabungan	6,183,004,057
- Deposito Berjangka	9,803,800,000
- Simpanan Dari Bank Lain	2,000,000,000
- Pinjaman Dari Bank Lain lebih dari 3 bulan	-
Jumlah Utang Lancar	18,008,078,771
CASH RATIO	31.57%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA

ROA dan BOPO

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BULAN	TOTAL ASET 2024
Januari	33,287,387,073
Pebruari	33,271,586,297
Maret	31,957,792,603
April	31,295,983,338
Mei	30,831,194,628
Juni	29,750,279,872
Juli	29,361,836,055
Agustus	29,504,079,841
September	29,445,961,492
Oktober	29,554,245,817
Nopember	29,897,057,780
Desember	29,602,511,114
TOTAL	367,759,915,910

Laba sebelum pajak 321,532,461
Rata-rata Aset 30,646,659,659
ROA 1.05%

Biaya Operasional 3,269,988,596
Pendapatan Operasional 3,585,447,785
BOPO 91.20%

.....
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
.....



KRISTIANTO, TARIGAN & MARGANA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
No.Reg.KAP : KEP-576/KM.1/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan No: 00016/2.1376/AU.2/07/1367-1/1/III/2025

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT BPR Wuni Artha Utama
Klaten

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Wuni Artha Utama, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) di Indonesia.

Basis untuk Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan Nomor: 00015/2.0791/AU.2/07/0067-3/1/II/2024 tertanggal 07 Februari 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memilikialternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Kristianto, Tarigan & Margana
Registered Public Accountants

Jl. Menoreh Raya 53, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Phone 024.8502753
HP. 081 2288 3331, 0811 2576 110 | Email : kapktm2022@gmail.com | margana5353@gmail.com



KRISTIANTO, TARIGAN & MARGANA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
No.Reg.KAP : KEP-576/KM.1/2022

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetap bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kristianto, Tarigan & Margana
Registered Public Accountants

Jl. Menoreh Raya 53, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Phone 024.8502753
HP: 081 2288 3331, 0811 2576 110 | Email : kapktm2022@gmail.com | margana5353@gmail.com



KRISTIANTO, TARIGAN & MARGANA

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
No.Reg.KAP : KEP-576/KM.1/2022

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Kristianto, Tarigan & Margana



Kristianto Purwokowidodo, S.E., M.M., Akt., CPA
NRAP 1367

Semarang, 05 Maret 2025



Kristianto, Tarigan & Margana
Registered Public Accountants

Jl. Menoreh Raya 53. Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Phone 024.8502753
HP.081 2288 3331, 0811 2576 110 | Email : kapktm2022@gmail.com | margana5353@gmail.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	KRISTIANTO PURWOKOWIDODO

Form D.00.00

Surat Pernyataan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febry Nurcahyo Alfath, SE
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Identitas (KTP/~~Passport~~) : 3314092008870003
Alamat : Puro Asri RT 022 RW 010 Puro Karangmalang Sragen
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama [PT BPR Wuni Artha Utama] yang berkedudukan di [Klaten] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- 1) kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
- 2) tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank; dan
- 3) hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

Penyampaian data dan/ atau informasi sebagaimana angka 2) dan angka 3) merupakan pemenuhan penyampaian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 25 April 2025



Febry Nurcahyo Alfath, SE
Direktur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	JL RAYA KLATEN - SOLO KM. 8, MEGER, CEPER, KLATEN
Nomor Telepon	(0272) 331032
Penjelasan Umum	Perkembangan Industri Jasa Keuangan, khususnya industri Bank Perekonomian Rakyat saat ini cukup dinamis. Tidak lepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha Perbankan yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola BPR atau Good Corporate Governance pada industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perkembangan industri jasa keuangan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Secara keseluruhan Penerapan Tata Kelola Bank berjalan dengan cukup baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola dan telah mempersiapkan Struktur Tata Kelola yang mendukung seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkompeten serta kebijakan dan prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Febry Nurcahyo Alfath, SE	Direktur	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank secara profesional dan bertanggungjawab kepada pemegang saham melalui RUPS serta Mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya yang diatur dalam Anggaran Dasar,Peraturan Perundangan dan Ketentuan Internal Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Drs. Sunardi	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata Kelola bagi BPR dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasehat kepada Direksi tentang kebijakan strategis Bank. Menyetujui RBB Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan RBB.
Fitri Rayahu, SE	Komisaris	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal, Hasil pengawasan OJK, Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan Bank terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Rekomendasi kepada Direksi

Keterangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

Saat ini BPR belum mempunyai Komite.

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Saat ini BPR belum mempunyai Komite.

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
Febry Nurcahyo Alfath, SE				
Anggota Dewan Komisaris				
Drs. Sunardi	4.325.000.000,00	46,51	3.700.000.000,00	46,25
Fitri Rayahu, SE	3.925.000.000,00	42,20	3.350.000.000,00	41,87

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang saham tidak mempunyai kepemilikan saham pada kelompok Usaha BPR.

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Febry Nurcahyo Alfath, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham			
Drs. Sunardi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Drs. Sunardi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak mempunyai hubungan keuangan dengan pengurus lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
Drs. Sunardi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Tidak memiliki hubungan keluarga antara Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	60.000.000	2	120.000.000
Tunjangan	1	92.776.188	2	176.636.200
Tantiem	1	0	2	0
Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
Remunerasi lainnya	1	0	2	0
Total Remunerasi		152.776.188		296.636.200
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	1	0	2	0
Transportasi	1	173.000.000	2	0
Asuransi Kesehatan	1	8.595.000	2	7.200.000
Fasilitas Lain-Lainnya	1	0	2	0
Total Fasilitas Lain		181.595.000		7.200.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		334.371.188		303.836.200

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,97
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,12
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,90

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS)

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
18-01-2024	2	Evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2023
18-04-2024	2	Evaluasi kinerja triwulan I tahun 2024
15-07-2024	2	Evaluasi kinerja triwulan II tahun 2024
14-10-2024	2	Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2024

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun)

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Drs. Sunardi	4	0	100,00
Fitri Rayahu, SE	4	0	100,00

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Kehadiran Anggota Dewan Komisaris)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Selama Tahun 2024 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal (Internal Fraud).

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Selama Tahun 2024 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
15-06-2023	01	Kegiatan CSR TA. 2024	Bansos	400.000
19-09-2023	01	Kegiatan CSR TA. 2024	Ajang Kreativitas Anak-SDIT Delanggu	500.000

Selama Tahun 2024 BPR telah ikut serta peduli terhadap lingkungan sekitar dan akan selalu berkelanjutan.

Form F.00.00**Dokumen Pendukung**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Laporan Tata Kelola BPR**Periode Desember 2024**A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jln. Raya Klaten- Solo, Km.08, Meger, Ceper, Klaten
Nomor Telepon	: (0272) 331032
Penjelasan Umum	: Perkembangan Industri Jasa Keuangan, khususnya industri Bank Perekonomian Rakyat saat ini cukup dinamis. Tidak lepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha Perbankan yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola BPR atau Good Corporate Governance pada industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perkembangan industri jasa keuangan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Secara keseluruhan Penerapan Tata Kelola Bank berjalan dengan cukup baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dan telah mempersiapkan Struktur Tata Kelola yang mendukung seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkompeten serta kebijakan dan prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Febry Nurcahyo Alfath, SE	3314092008870003	0100	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank secara profesional dan bertanggungjawab kepada pemegang saham melalui RUPS serta Mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan Perundangan dan Ketentuan Internal Bank.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Drs.Sunardi	3310241206520001	0100	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata Kelola bagi BPR dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,memberikan nasehat kepada Direksi tentang kebijakan strategis Bank.Menyetujui RBB Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan RBB.
Fitri Rahayu,SE	3310126402640001	0200	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank,Audit Eksternal,Hasil pengawasan OJK,Mengarahkan,memantau dan mengevaluasi Rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan Bank terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Saat ini BPR belum mempunyai Komite.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
Anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR.
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) tahun Sebelumnya
1	3310241206520001	Drs. Sunardi	4.325.000.000	46.51	3.700.000.000	46.25
2	3310126402640001	Fitri Rahayu, SE	3.925.000.000	42.20	3.350.000.000	41.87

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
Direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
Anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

- F. Hubungan Keluarga Annggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
Direksi idak ada hubungan keluarga antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.
 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.
- G. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	60.000.000	2	120.000.000
Tunjangan	1	92.776.188	2	176.636.200
Tantiem	1	0	2	0
Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
Remunerasi lainnya	1	0	2	0
Total Remunerasi		152.776.188		296.636.200
Fasilitas Lain				
Perumahan	1	0	2	0
Transportasi	1	173.000.000	2	0
Asuransi Kesehatan	1	8.595.000	2	7.200.000
Fasilitas Lain-Lainnya	1	0	2	0
Total Fasilitas Lain		181.595.000		7.200.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		334.371.188		303.836.200

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.97
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.12
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.90

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1(satu)_ Tahun

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
20240118	2	Evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2023
20240418	2	Evaluasi kinerja triwulan I tahun 2024
20240715	2	Evaluasi kinerja triwulan II tahun 2024
20241014	2	Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2024

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
3310241206520001	Drs. Sunardi	4	0	100.00
3310126402640001	Fitri Rahayu, SE	4	0	100.00

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama Tahun 2024 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal (*Internal Fraud*).

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama Tahun 2024 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20230615	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan CSR TA. 2024	Bansos	400.000
20230919	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan CSR TA. 2024	Ajang Kreativitas Anak-SDIT Delunggu	500.000

Hasil Penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola

Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,95	0,22	2,17	0,43	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50 M Jumlah Direksi paling sedikit 2 (Dua) Orang namun saat ini BPR memiliki 1 (satu) orang,bertindak sebagai Direktur dan Untuk Posisi Direktur YMPK saat ini belum terisi.
0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,85	0,20	2,05	0,31	Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang dan telah mengadakan rapat Komisaris minimal 4 kali setahun.Dan telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0,25	BPR telah memiliki kebijakan,sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan bagi Pengurus dan Pegawai BPR.
0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,40	1,28	0,37	3,05	0,31	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah langkah untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK perundang undangan serta peraturan lain yang berlaku.
0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,20	BPR telah memiliki kebijakan Audit Intern dan sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,05	BPR sudah melakukan penugasan audit kepada KAP dan telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja,ruang lingkup serta membangun komunikasi antara OJK dan KAP yang dimaksud.
0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,100	1,17	0,86	0,20	2,23	0,22	BPR sudah menyusun dan melaporkan profil risiko sesuai dengan ketentuan OJK.
0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15	BPR telah melakukan pengkinian dan evaluasi kebijakan,sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern,ekstern serta prinsip kehati hatian.Dan disampaikan sesuai ketentuan OJK.
1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15	Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
1200	Nilai Komposit						2,23	
1300	Peringkat Komposit						2	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0101	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50 M Jumlah Direksi paling sedikit 2 (Dua) Orang namun saat ini BPR memiliki 1 (satu) orang, bertindak sebagai Direktur dan Untuk Posisi Direktur YMFK saat ini belum terisi.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal dikota / kabupaten yang berbeda pada Provinsi yang sama.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Anggota Direksi tidak mempunyai penasihat perorangan atau jasa konsultan.
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
S010A	Total nilai skala penerapan	12	
S010B	Rata-rata	2,00	
S010C	Bobot	0,50	
S010D	Nilai struktur	1,00	
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab cukup independen serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindak lanjut sebagian besar temuan Audit Intern maupun Ekstern.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi telah membudayakan serta mendorong setiap pegawai BPR untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja dan kualitas individu.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi cukup mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
P010A	Total nilai skala penerapan	19	
P010B	Rata-rata	2,38	
P010C	Bobot	0,40	
P010D	Nilai Proses	0,95	
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan sudah didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions (Jika ada).
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan namun hasilnya belum optimal.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola Kepada Otoritas Jasa Keuangan,Asosiasi BPR dan Kantor Media.
H010A	Total nilai skala penerapan	11	
H010B	Rata-rata	2,20	
H010C	Bobot	0,10	
H010D	Nilai Hasil	0,22	

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 (Dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah)
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman,tata tertib kerja ,etika kerja dan waktu kerja.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan pada lembaga lainnya.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama Anggota Komisaris maupun Anggota Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Sesuai ketentuan yang berlaku,BPR tidak mempunyai Komisaris Independen.
S020A	Total nilai skala penerapan	18	
S020B	Rata-rata	2,00	
S020C	Bobot	0,50	
S020D	Nilai struktur	1,00	
P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan kepada Direksi.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan monitor tindak lanjut hasil temuan audit intern ataupun audit ekstern.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris selalu hadir dalam penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris minimal 3 (Tiga) bulan sekali.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dewan Komisaris berjumlah 2 (Dua) orang dan keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat namun jika terjadi perbedaan pendapat selalu mencantumkan <i>Dissenting Opinion</i> .
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi YMKF.
P020A	Total nilai skala penerapan	17	
P020B	Rata-rata	2,13	
P020C	Bobot	0,40	
P020D	Nilai Proses	0,85	
H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasikan dengan baik.
H020A	Total nilai skala penerapan	2	
H020B	Rata-rata	2,00	
H020C	Bobot	0,10	
H020D	Nilai Hasil	0,20	

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
S030A	Total nilai skala penerapan	0	
S030B	Rata-rata	0,00	
S030C	Bobot	0,50	
S030D	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P030A	Total nilai skala penerapan	0	
P030B	Rata-rata	0,00	
P030C	Bobot	0,40	
P030D	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
H030A	Total nilai skala penerapan	0	
H030B	Rata-rata	0,00	
H030C	Bobot	0,10	
H030D	Nilai Hasil	0,00	

Penanganan Benturan Kepentingan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0400			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penyelesaian mengenai benturan kepentingan bagi pengurus dan pegawai BPR.
S040A	Total nilai skala penerapan	3	
S040B	Rata-rata	3,00	
S040C	Bobot	0,50	
S040D	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0400			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
P040A	Total nilai skala penerapan	2	
P040B	Rata-rata	2,00	
P040C	Bobot	0,40	
P040D	Nilai struktur	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0400			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dimaksud.
H040A	Total nilai skala penerapan	2	
H040B	Rata-rata	2,00	
H040C	Bobot	0,10	
H040D	Nilai struktur	0,20	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR sudah memiliki pedoman kerja intern bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S050A	Total nilai skala penerapan	14	
S050B	Rata-rata	2,80	
S050C	Bobot	0,50	
S050D	Nilai struktur	1,40	
P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan review dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang sesuai Otoritas Jasa Keuangan.
P050A	Total nilai skala penerapan	16	
P050B	Rata-rata	3,20	
P050C	Bobot	0,40	
P050D	Nilai Proses	1,28	
H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR secara berkelanjutan meminimalkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
H0503	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Saat ini belum terisi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
H050A	Total nilai skala penerapan	11	
H050B	Rata-rata	3,67	
H050C	Bobot	0,10	
H050D	Nilai Hasil	0,37	

Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sesuai peraturan yang berlaku, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah menjalankan tugas dan fungsi audit intern independen.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Dalam struktur organisasi Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR sudah memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern.
S060A	Total nilai skala penerapan	10	
S060B	Rata-rata	2,00	
S060C	Bobot	0,50	
S060D	Nilai struktur	1,00	
P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman kerja audit intern.
P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR belum melakukan Kaji ulang.
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi Audit Intern telah melaksanakan secara memadai dan independen mencakup persiapan audit sampai dengan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM Fungsi Audit Intern melalui pelatihan secara berkelanjutan.
P060A	Total nilai skala penerapan	8	
P060B	Rata-rata	2,00	
P060C	Bobot	0,40	
P060D	Nilai Proses	0,80	
H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern secara periodik telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR saat ini dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,-
H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
H060A	Total nilai skala penerapan	8	
H060B	Rata-rata	2,00	
H060C	Bobot	0,10	
H060D	Nilai Hasil	0,20	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR sudah melakukan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dan telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar profesional dan membangun komunikasi antara OJK dan KAP yang dimaksud.
S070A	Total nilai skala penerapan	2	
S070B	Rata-rata	2,00	
S070C	Bobot	0,50	
S070D	Nilai struktur	1,00	
P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR sudah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta melalui persetujuan RUPS.
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
P070A	Total nilai skala penerapan	4	
P070B	Rata-rata	2,00	
P070C	Bobot	0,40	
P070D	Nilai Proses	0,80	
H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management Letter disampaikan ke BPR tepat Waktu.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan OJK.
H070A	Total nilai skala penerapan	4	
H070B	Rata-rata	2,00	
H070C	Bobot	0,10	
H070D	Nilai Hasil	0,20	

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR sudah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
S080A	Total nilai skala penerapan	7	
S080B	Rata-rata	2,33	
S080C	Bobot	0,50	
S080D	Nilai struktur	1,17	
P0801	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi BPR sudah menyusun dan mengevaluasi pedoman penerapan manajemen risiko serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Komisaris BPR telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR sudah melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum maksimal.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPR telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko serta kompetensi SDM melalui Pelatihan dan/atau sosialisasi.
P080A	Total nilai skala penerapan	15	
P080B	Rata-rata	2,14	
P080C	Bobot	0,40	
P080D	Nilai Proses	0,86	
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun dan melaporkan profil risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
H080A	Total nilai skala penerapan	4	
H080B	Rata-rata	2,00	
H080C	Bobot	0,10	
H080D	Nilai Hasil	0,20	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK.
S090A	Total nilai skala penerapan	2	
S090B	Rata-rata	2,00	
S090C	Bobot	0,50	
S090D	Nilai struktur	1,00	
P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan pengkinian dan evaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR dalam memberikan kredit kepada pihak terkait ataupun kredit besar sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
P090A	Total nilai skala penerapan	4	
P090B	Rata-rata	2,00	
P090C	Bobot	0,40	
P090D	Nilai Proses	0,80	
H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melakukan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H090A	Total nilai skala penerapan	4	
H090B	Rata-rata	2,00	
H090C	Bobot	0,10	
H090D	Nilai Hasil	0,20	

Rencana Bisnis BPR

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Direksi BPR sudah menyusun RBB dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi Misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun RBB tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
S100A	Total nilai skala penerapan	6	
S100B	Rata-rata	2,00	
S100C	Bobot	0,50	
S100D	Nilai struktur	1,00	
P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern,ekstern serta prinsip kehati hatian.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan secara menyeluruh atas Rencana Bisnis BPR.
P100A	Total nilai skala penerapan	4	
P100B	Rata-rata	2,00	
P100C	Bobot	0,40	
P100D	Nilai Proses	0,80	
H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan perubahannya telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H100A	Total nilai skala penerapan	2	
H100B	Rata-rata	2,00	
H100C	Bobot	0,10	
H100D	Nilai Hasil	0,20	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistim pelaporan keuangan dan non keuangan BPR didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai dan SDM cukup kompeten.
S110A	Total nilai skala penerapan	2	
S110B	Rata-rata	2,00	
S110C	Bobot	0,50	
S110D	Nilai struktur	1,00	
P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melaksanakan transparansi informasi dan penggunaan data nasabah yang berpedoman kepada ketentuan OJK.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.
P110A	Total nilai skala penerapan	8	
P110B	Rata-rata	2,00	
P110C	Bobot	0,40	
P110D	Nilai Proses	0,80	
H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi sesuai ketentuan OJK.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
H110A	Total nilai skala penerapan	4	
H110B	Rata-rata	2,00	
H110C	Bobot	0,10	
H110D	Nilai Hasil	0,20	



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten

Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

Nomor : 053/BPR-WAU/IV/2025
Lampiran : 1 (Satu) buku
Perihal : Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024.

Kepada Yth :
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl.Slamet Riyadi Nomor 328,Sriwedari
Laweyan,Solo.

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ,maka dengan ini kami sampaikan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola BPR PT.BPR Wuni Artha Utama-Klaten Periode Periode Januari 2024 s.d Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Klaten, 21 April 2025
PT. BPR Wuni Artha Utama

(Febry Nurcahyo Alfath,SE)
Direktur



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten

Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

Nomor : 054/BPR-WAU/IV/2025
Lampiran : 1 (Satu) Buku
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Wuni Artha Utama-Klaten.

Kepada Yth :
Pimpinan Perbarindo Pusat
KOMP.PATRA II No.46
Jl.Jend Ahmad Yani Bypass,
RT 15 RW 03 Cempaka Putih Timur
Cempaka Putih,Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat,maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Wuni Artha Utama-Klaten Periode Januari 2024 s.d Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami mohon menjadikan periksa.

Klaten,21 April 2025

PT. BPR Wuni Artha Utama

Direksi



(Febry Nurcahyo Alfath,SE)

Direktur

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Dewan KOMISARIS PT BPR Wuni Artha Utama
2. Perbarindo DPD Jawa Tengah
3. Media BPR
4. Arsip



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

LEMBAR PERNYATAAN

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Wuni Artha Utama Klaten Posisi Akhir Desember 2024 ini dibuat.Terimakasih atas perhatiannya.

Klaten,21 April 2025

PT.BPR WUNI ARTHA UTAMA



Febry Nurcahyo Alfath,SE
Direktur